

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PEMBERIAN  
BANTUAN OLEH KOPERASI DESA DAN LEMBAGA *LEASING* DALAM  
PEMBIAYAAN ACARA KEAGAMAAN**

(Studi Kasus di Desa Telogorejo, kecamatan Batanghari, kabupaten Lampung  
Timur, Provinsi Lampung)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1  
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**DJAYA PUTRA PRATAMA**

**NPM:1621030218**

**Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PEMBERIAN  
BANTUAN OLEH KOPERASI DESA DAN LEMBAGA *LEASING* DALAM  
PEMBIAYAAN ACARA KEAGAMAAN**

(Studi Kasus di Desa Telogorejo, kecamatan Batanghari, kabupaten Lampung  
Timur, Provinsi Lampung)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah

Oleh:

**DJAYA PUTRA PRATAMA**

**NPM:1621030218**

**Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Prof.Dr. H. Faisal, S.H, M.H**

**Pembimbing II : Juratul Khulwah, M.SI**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2020 M**

## ABSTRAK

Pada saat sekarang ini ditengah kehidupan masyarakat pada umumnya banyak sekali kegiatan kegiatan besar salah satunya acara keagamaan, yang mana pada acara tersebut sumber dana yang di dapatkan atau dihimpun bukan hanya dari sumbangsih masyarakat saja melainkan ada juga Hibah bantuan dari koperasi Desa dan lembaga *leasing*, kemudian bantuan Hibah yang telah di berikan perusahaan tersebut tidak diberikan secara cuma cuma melainkan ada kesepakatan antara dari pihak panitia penyelenggara dengan pihak pemberi bantuan Hibah. Rumusan masalah di dalam skripsi ini adalah Bagaimana Praktik Pemberian Bantuan Oleh Koperasi Desa dan Lembaga *Leasing* Dalam Pembiayaan Acara Keagamaan studi Kasus Di Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung dan Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang pelaksanaan Praktik Pemberian Bantuan Oleh Koperasi Desa Dan Lembaga *Leasing* Dalam Pembiayaan Acara Keagamaan Yang Berstudi Kasus Di Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Praktik Pemberian Bantuan Oleh Koperasi Desa dan Lembaga *Leasing* Dalam Pembiayaan Acara Keagamaan studi Kasus Di Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung dan untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam Tentang pelaksanaan Praktik Pemberian Bantuan Oleh Koperasi Desa Dan Lembaga *Leasing* Dalam Pembiayaan Acara Keagamaan Yang Berstudi Kasus Di Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian pada panitia pelaksana kegiatan acara keagamaan di Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah wawancara dan dokumentasi, setelah data terkumpul peneliti melakukan analisis dengan metode analisis kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Berdasarkan Hasil penelitian tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa panitia pelaksana kegiatan acara keagamaan dalam hal ini karang taruna, risma, dan tokoh masyarakat desa Telogorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung ini mengajukan proposal bantuan dana dalam rangka untuk pembiayaan kegiatan acara keagamaan yang ditujukan kepada koperasi desa dan lembaga *leasing*. Dalam hal ini, koperasi desa dan lembaga *leasing* memberikan tawaran kerjasama dengan syarat yaitu kerjasama timbal balik. Timbal balik yang diinginkan adalah pihak leasing memberikan bantuan dana dengan syarat lembaga mereka di promosikan di dalam kegiatan acara keagamaan tersebut. apabila di tinjau dari Hukum Islam praktik ini belum memenuhi syarat dan ketentuan karena dalam praktik menjalankan bisnis mencari keuntungannya koperasi desa dan lembaga *leasing* ini menerapkan bunga dimana bunga tersebut termasuk riba yang itu sudah jelas di haramkan oleh Allah SWT di dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 275.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tanga dibawah ini:

Nama : Djaya Putra Pratama  
NPM : 1621030218  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pemberian Bantuan Oleh Koperasi Desa Dan Lembaga *Leasing* Dalam Pembiayaan Aacara Keagamaan (Studi Kasus Di Desa Telogorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila ada penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Desember 2020



Djaya Putra Pratama  
NPM : 1621030218





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289**

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan serta arahan secukupnya, maka skripsi saudara:

**Nama : DJAYA PUTRA PRATAMA**

**NPM : 1621030218**

**Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**Fakultas : Syari'ah**

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK  
PEMBERIAN BANTUAN OLEH KOPERASI DESA DAN  
LEMBAGA LEASING DALAM PEMBIAYAAN ACARA  
KEAGAMAAN  
(Studi Kasus Di Desa Telogorejo, Kecamatan Batanghari,  
Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.**

**NIP. 195512251985031002**

**Juratul Khulwah, M.S.I.**

**NIP. 199107092018012002**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I.**

**NIP. 197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289**

**PENGESAHAN**

Skripsi ini dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PEMBERIAN BANTUAN OLEH KOPERASI DESA DAN LEMBAGA LEASING DALAM PEMBIAYAAN ACARA KEAGAMAAN TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PEMBERIAN BANTUAN OLEH KOPERASI DESA DAN LEMBAGA LEASING DALAM PEMBIAYAAN ACARA KEAGAMAAN (Studi Kasus Di Desa Telogorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung)**, disusun oleh **Djaya Putra Pratama, NPM. 1621030218**, jurusan: **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**, telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : **Selasa, 12 januari 2021.**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.**

**Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H.**

**Penguji I : Dr. H. Jayusman, S.Ag.**

**Penguji II : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.**

**Penguji III : Juratul Khulwah, M.S.I.**



**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. H. Khaluddin Tahmid, M.H.**

**NPM. 196210221993031002**



## MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Dan Janganlah Sebahagian Kamu Memakan Harta Sebahagian Yang Lain Di  
Antara Kamu Dengan Jalan Yang Bathil Dan (Janganlah) Kamu Membawa  
(Urusan) Harta Itu Kepada Hakim, Supaya Kamu Dapat Memakan Sebahagian  
Daripada Harta Benda Orang Lain Itu Dengan (Jalan Berbuat) Dosa, Padahal  
Kamu Mengetahui.

(Q.S Al Baqarah 188)

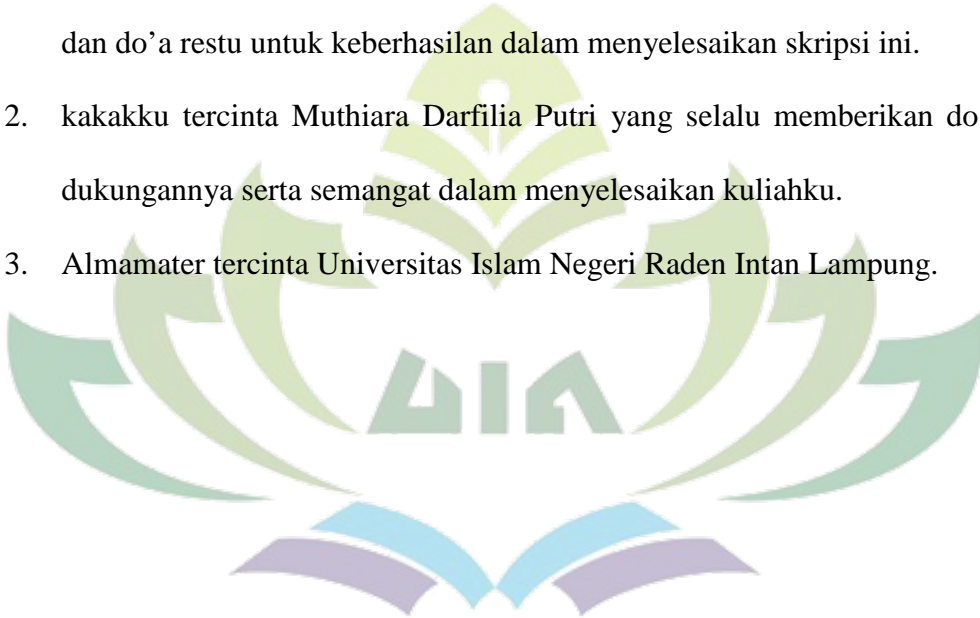


## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Papah dan Mamah tersayang (Darwis dan Pilian Sari) yang dengan sabar, tulus, ikhlas dan penuh kasih sayang selalu memberikan semangat, dukungan dan do'a restu untuk keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. kakakku tercinta Muthiara Darfilia Putri yang selalu memberikan do'a dan dukungannya serta semangat dalam menyelesaikan kuliahku.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.





## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap Djaya Putra Pratama, dilahirkan di Kotabumi, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, pada tanggal 9 Juni 1998, anak kedua dari pasangan Darwis dan Pilian Sari. Pendidikan di mulai dari Sekolah Dasar Negeri 4 Tanjung aman Lampung Utara dan selesai pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kotabumi Lampung utara selesai tahun 2013, Sekolah Menengah Atas 1 Kotabumi Lampung Utara selesai tahun 2016. Kemudian, mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi program S1 pada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung di mulai pada semester I Tahun Akademik 2016/2017.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pemberian Bantuan Oleh Koperasi Desa Dan Lembaga *Leasing* Dalam Pembiayaan Acara Keagamaan (Studi Kasus Di Desa Telogorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi).

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari'ah. Jika di dalamnya dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan, sesungguhnya itu terjadi karena ketidak sengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan, untuk itu maka koreksi dan kritik sangat diharapkan.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tidak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.



3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I. selaku sekretaris Jurusan Muamalah.
4. Bapak Prof.Dr. H. Faisal, S.H., M.H. selaku pembimbing I, dan ibu Juratul Khulwah, M.S.I. selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen serta staf karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu selama mengikuti perkuliahan.
6. Sahabat-sahabatku dan rekan-rekan dari Gerakan Hebat Anak Muda (GHAM'16), Dan Teman Seperjuangan Dalam Menuntut Ilmu muhammad Afdhol Kusuma Ningrat, Nofriwan Riadi, Rama Qchazali Adam Kosagie, Reo Teo Dan Harry Fernando. Dan seluruh Mahasiswa Muamalah B
7. Almamater Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung tercinta.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas kebaikan semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan betapapun kecilnya skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keIslaman.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bandar Lampung, Desember 2020

Djaya Putra Pratama  
NPM. 1621030081





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Penjelasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	4
C. Latar Belakang Masalah .....	5
D. Fokus Penelitian/Batasan Masalah .....	8
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan Penelitian .....	9
G. Signifikasi Penelitian .....	9
H. Metode Penelitian .....	10

### BAB II : LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori .....	16
a) Akad Dalam Islam	
1. Pengertian Akad .....	16
2. Dasar Hukum Akad .....	17
3. Rukun Akad.....	18
4. Syarat Akad .....	20

5. Macam macam Akad .....	22
6. Tinjauan Akad .....	24
b) Hibah	
1. Pengertian Hibah .....	24
2. Dasar Hukum Hibah .....	32
3. Rukun Dan Syarat Hibah.....	35
4. Pelaksanaan Akad Hibah.....	44
5. Macam Macam Hibah .....	45
6. Pemberian Hibah Bersyarat.....	47
7. Pemberian Hibah Bersyarat Menurut Hukum Islam .....	55
8. Hikmah Hibah .....	67
B. Tinjauan Pustaka.....	69
<b>BAB III : LAPORAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Profil Desa Telogorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.....	73
B. Pelaksanaan dari kegiatan pemberian bantuan oleh koperasi desa dan lembaga <i>leasing</i> dalam pembiayaan acara keagamaan di Desa Telogorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.....	89
<b>BAB IV : ANALISIS DATA</b>	
A. Praktik pemberian bantuan oleh koperasi desa dan lembaga <i>leasing</i> dalam pembiayaan acara keagamaan di Desa Telogorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.....	94
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang praktik pemberian bantuan oleh koperasi desa dan lembaga <i>leasing</i> dalam pembiayaan acara keagamaan di Desa Telogorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung .....	98
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	99
B. Rekomendasi.....	100



**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Nama-Nama Demang, Lurah, Kepala Desa Sebelum Dan Sesudah Berdirinya Desa Telogorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten lampung Timur, Provinsi Lampung.....	77
2. Geografis Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.....	79
3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung .....	81
4. Pekerjaan Dan Mata Pencaharian Masyarakat Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung .....	82
5. Agama Masyarakat Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung .....	84
6. Riwayat Pendidikan Masyarakat Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.....	84
7. Prasarana dan Sarana Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung .....	85
8. Keadaan Pemerintahan Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung .....	87
9. Struktur Pemerintahan Desa Telogo Rejo Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung .....	88

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Pertanyaan Wawancara
2. Daftar Pertanyaan Wawancara
3. Jadwal Wawancara
4. Hasil Dokumentasi kegiatan acara keagamaan Desa Telogorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung
5. Hasil Dokumentasi di Koperasi desa dan lembaga Leasing di Desa Telogorejo, Kecamatan Batanghari, yh.....Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung
6. Surat Izin Riset
7. Berita Acara Seminar Proposal
8. Lembar Acc Proposal
9. Blangko Konsultasi
10. Lembar Acc Skripsi
11. Surat Pernyataan Bebas Cek Plagiatsi/Turnitin
12. Lembar Hasil Turnitin



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penjelasan Judul

Untuk lebih memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang dimaksud dan guna menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda atau bahkan kesalah pahaman pembaca maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai penjelasan judul dengan memberikan arti terhadap beberapa penggalan istilah yang terkandung didalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pemberian Bantuan Oleh Koperasi Desa Dan *Leasing* Dalam Pembiayaan Acara Keagamaan"** (Studi Kasus Di Desa Telogorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)

Adapun beberapa istilah yang terkandung di dalam judul dan akan diuraikan secara sistematis adalah sebagai berikut :

#### 1. Tinjauan Hukum Islam

##### a. Tinjauan Hukum Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tinjauan diartikan sebagai hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>1</sup>, Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan Wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>2</sup> Jadi yang dimaksud dengan

---

<sup>1</sup>Hamid St, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Dua,1999), h 430

<sup>2</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid I* (Jakarta: Kencana, 2009), h.6.

tinjauan hukum Islam adalah suatu pandangan atau pendapat yang didasari dengan seperangkat peraturan berdasarkan Wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku setiap manusia yang beragama Islam.

## 2. Praktik Pemberian bantuan Koperasi Desa dan Lembaga *Leasing* dalam Pembiayaan Acara Keagamaan

### a. Praktik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia praktik diartikan sebagai pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, pelaksanaan pekerjaan, perbuatan menerapkan teori (keyakinan).<sup>3</sup>

### b. Pemberian Bantuan

Menurut kamus besar bahasa indonesia pemberian bantuan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memberi barang yang dipakai untuk memberi bantuan atau pertolongan.<sup>4</sup>

### c. Koperasi

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan dan kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan bentuk dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan

---

<sup>3</sup> Hamid St, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Dua, 1999), h 410

<sup>4</sup> *Ibid*, h.406

dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang<sup>5</sup>

d. Lembaga *leasing*

*Leasing* (sewa guna usaha) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi *finance lease* maupun hak guna sewa tanpa hak opsi *operating lease* untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.<sup>6</sup>

e. Keagamaan

Keagamaan berasal dari kata dasar “agama” yang mendapat awalan “ke” dan akhiran “an”, agama itu sendiri mempunyai arti kepercayaan kepada Tuhan, ajaran kebaikan dan bertalian dengan kepercayaan.<sup>7</sup> Jadi Acara keagamaan adalah acara yang mempertujukan kegiatan untuk dinikmati oleh masyarakat.

Dari penjelasan di atas, maka disimpulkan bahwa judul ini adalah tentang kegiatan masyarakat di Desa Telogorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung timur dalam pelaksanaan menjalankan acara keagamaan yang diberikan bantuan oleh koperasi desa dan lembaga *leasing* dalam pembiayaan acara tersebut

<sup>5</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.287.

<sup>6</sup> Veithzal Rivai, *Financial Institution Management*, (Jakarta: Graha Grafindo Persada, 2013), h.219.

<sup>7</sup> S. Baharta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Bintang Terang, 1995), h.4.



## B. Alasan Memilih Judul

Adapun penulis memilih judul "**Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pemberian bantuan Oleh Koperasi Desa Dan *Leasing* Dalam Pembiayaan Acara Keagamaan**", dengan mempertimbangkan alasan subjektif dan alasan objektif sebagai berikut

### 1. Secara Subjektif

- a. Judul skripsi ini pembahasannya sangat sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni dan penulis merasa perlu mengadakan penelitian lebih lanjut tentang "Tinjauan Hukum Islam Tentang praktik pemberian bantuan koperasi Desa dan lembaga *leasing* dalam pembiayaan acara keagamaan".
- b. Dari aspek pembahasan, judul tersebut sangat memungkinkan untuk mengadakan penelitian dan serta didukung tersedianya data-data yang dibutuhkan sehingga diharapkan penelitian ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

### 2. Secara Objektif

- a. Pada saat ini sering terjadi pelaksanaan acara keagamaan yang dilaksanakan oleh organisasi masyarakat yang bertujuan baik untuk masyarakat.
- b. Karena dalam pelaksanaan kegiatan pembiayaan acara keagamaan ini dari sistem pemungutan biaya dengan pihak lembaga yang menerapkan riba.

### C. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan ajaran memberikan penjelasan secara universal, yang diturunkan agar dijadikan sebagai pedoman bagi umatnya dalam kehidupan. Dan sebagai agama yang datang untuk memberikan kemaslahatan umat manusia.<sup>8</sup> Serta didalamnya terdapat peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah Swt dan Sunah Rasul tentang tingkah laku orang mukhalaf berlaku mengikat bagi semua pemeluknya.<sup>9</sup> Salah satu bentuk taqarrub kepada Allah Swt dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial dan menumbuhkan rasa kesetiakawanan serta kepedulian sosial adalah dengan melakukan pemberian hibah.<sup>10</sup> Kata hibah berasal dari bahasa arab yang telah diadopsi menjadi kata bahasa Indonesia masdar dari kata wahaba yang berarti pemberian,<sup>11</sup> maka dengan kata lain kesadaran untuk melakukan kebaikan.<sup>12</sup> Menurut Imam Taqiya Al-Din Abi Bakr Ibnu Muhamad Al-Husaini hibah merupakan “pemberian atau hadiah sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharap penggantian (balasan)”.<sup>13</sup>

Pada saat sekarang ini ditengah kehidupan masyarakat pada umumnya banyak sekali kegiatan kegiatan besar salah satunya acara keagamaan, pada tahun 2018 acara keagamaan ini di laksanakan untuk memperingati Hari Raya Idul Adha dengan di buatnya acara Tabligh akbar dengan mengundang para

---

<sup>8</sup> Khoiruddin Buzama, , "Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam di Indonesia." Jurnal Al-'Adalah, Vol. 10, No.2, Juli 2012 (Bandar Lampung Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2012).h. 468.(Online), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/300>. ( 15 Mei 2019 ).

<sup>9</sup> Syarifudin Amir, UsulFiqih, (Jilid 1, Cet.1) Jakarta: Logos, WacanaIlmu, 1997.h.46

<sup>10</sup> Chuzaimah T Yanggo, Hafis Anshari,Problematika Hukum Islam Konteporer,(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004),h.104.

<sup>11</sup> Helmi Karim, Fiqih Muamalah, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 73

<sup>12</sup> Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 343

<sup>13</sup> Handi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta : Rajawali Press, 2014), h. 43.

Ustad Profesional untuk memberikan kajian pada masyarakat di desa Telogorejo, kecamatan batanghari, kabupaten lampung timur, Provinsi lampung, yang mana pada acara tersebut sumber dana yang di dapatkan atau dihimpun bukan hanya dari sumbangsih masyarakat saja melainkan ada juga hibah bantuan dari koperasi Desa dan lembaga *leasing*, kemudian Hibah yang telah di berikan Lembaga tersebut tidak diberikan secara cuma cuma melainkan ada kesepakatan antara dari pihak penyelenggara dengan pihak pemberi dana.

Kesepakatan yang di inginkan oleh koperasi desa dan lembaga leasing ini menawarkan ddengan memberikan Hibah berupa bantuan pembiayaan acara keagamaan tersebut dengan tawaran ajakan kerjasama, kerjasama yang dimaksud oleh koperasi desa dan lembaga *leasing* ini adalah dengan menjanjikan memberikan bantuan berupa dana kepada pihak panitia yang terdiri dari tokoh masyarakat, karang taruna, risma desa telogorejo, kecamatan batanghari, kabupaten lampung timur, provinsi lampung. dengan persyaratan mempromosikan dan memperkenalkan lembaga mereka kepada masyarakat di dalam kegiatan cara kegamaan tersebut dan juga menyediakan tempat untuk pihak koperasi desa dan lembaga *leasing* ini untuk memamerkan alat promosi lembaganya<sup>14</sup>

Di dalam Al Qur'an yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau telah mengatur tata cara memberikan Hibah Yang baik dan yang benar menurut ajaran hukum Islam. Adapun yang dijadikan

---

<sup>14</sup> Dieka Arie Kumbara Ketua Karang Taruna Desa Telogorejo, Wawancara Dengan penulis di Desa Telogorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung,



dasar hukum untuk melandasi kegiatan dalam akad kerjasama yang dapat di temukan di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayatt 177

Bantuan berupa Hibah yang di berikan oleh pihak Koperasi Desa dan lembaga *leasing* dalam acara keagamaan tersebut merupakan hasil keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut, yang mana sistem kerja yang di terapkan oleh koperasi desa ini adalah dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat yang sedang membutuhkan uang dengan jaminan berupa barang dan saat mengembalikan uang pinjaman tersebut dikenakan biaya tambahan administrasi. Sedangkan sistem kerja yang diterapkan oleh lembaga *leasing* adalah dengan pembiayaan masyarakat yang ingin memiliki kendaraan namun memiliki biaya yang terbatas dengan pengembalian dana talangan pembelian kendaraan tersebut dengan cicilan bunga untuk biaya administrasi tambahan.<sup>15</sup>

Dalam hal ini selain riba terdapat praktik yang belum jelas diperbolehkan atau tidak dalam hukum Islam dari praktik pemberian bantuan berupa Hibah yang diberikan untuk menjalankan pembiayaan kegiatan acara keagamaan yang dilakukan oleh pihak panitia pelaksana dengan pihak pemberi bantuan dari koperasi desa dan lembaga *Leasing* tersebut, karena kegiatan ini sudah sering dilaksanakan dan dijadikan kebiasaan acara tahunan untuk memperingati hari besar idul adha di Desa

---

<sup>15</sup> Eko wahyudi Pamong kesejahteraan rakyat , Wawancara Dengan Penulis di Desa Telogorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, 10 November 2020

Telorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung

Berdasarkan yang telah di jelaskan di atas, hal itulah kiranya penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pemberian Bantuan Oleh Koperasi Desa dan Lembaga Leasing Dalam Pembiayaan Acara Keagamaan (Studi Kasus Di Desa Telorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung)”

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Yang menjadi objek penelitian ini adalah bagaimana pihak penyelenggara acara keagamaan yang meminta bantuan dana untuk acara keagamaan kepada pihak koperasi Desa dan lembaga *leasing* dalam pembiayaan acara keagamaan tersebut dan dalam bantuan tersebut ada akad kerjasamanya
2. Batasan masalah pada penelitian ini adalah akad kerjasama yang belum jelas diperbolehkan atau tidak dalam pandangan hukum Islam mengenai pihak penyelenggara kegiatan acara keagamaan yang meminta bantuan dana untuk penyelenggaraan acara keagamaan dari pihak koperasi desa dan lembaga *leasing*

#### **E. Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah Yang Akan Dijabarkan Dan Dijawab Dalam Penelitian Ini, Yaitu:

1. Bagaimana Praktik Pemberian Bantuan Oleh Koperasi Desa dan Lembaga *Leasing* Dalam Pembiayaan Acara Keagamaan studi Kasus Di Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang pelaksanaan Praktik Pemberian Bantuan Oleh Koperasi Desa Dan Lembaga *Leasing* Dalam Pembiayaan Acara Keagamaan Yang Berstudi Kasus Di Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung?

#### **F. Tujuan Penelitian**

- a. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Praktik Pemberian Bantuan Oleh Koperasi Desa dan Lembaga *Leasing* Dalam Pembiayaan Acara Keagamaan Yang Berstudi Kasus Di Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung
- b. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Praktik Pemberian Bantuan Oleh Koperasi Desa Dan Lembaga *Leasing* Dalam Pembiayaan Acara Keagamaan Yang Berstudi Kasus Di Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung

#### **G. Signifikansi Penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian terhadap permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi para organisasi pemuda pemudi remaja masjid (risma) organisasi masyarakat agar



senantiasa dapat menjalankan kegiatan acara keagamaan sesuai dengan nilai nilai syariat Islam yang sudah dijalankan dan selebihnya dapat dipergunakan untuk bahan bacaan (literatur) terkait tata cara melaksanakan kegiatan acara keagamaan yang baik dan sesuai dengan nilai nilai syariat Islam.

#### b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman atau bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat luas, serta untuk memperluas wawasan bagi penulis sekaligus untuk memenuhi syarat akademik dan penyelesaian studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

### H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, karena metode kualitatif ini lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dan cenderung menggunakan analisis, metode ini merupakan penelitian yang sesuai dengan data lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Adapun dalam memecahkan masalah penelitian yaitu :

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian pada pemuda pemudi karang taruna, remaja Islam

masjid dan tokoh masyarakat Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dan penelitian ini

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Menurut Soerjono Soekanto kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan peristiwa yang ada di lapangan melalui interaksi langsung terkait Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik pemberian bantuan oleh koperasi desa dan lembaga *leasing* dalam pembiayaan acara keagamaan yang berstudi kasus Di Desa Telogorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.

## 3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun data penelitian ini yang diperoleh dari wawancara dengan responden langsung yang

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1989), h. 43.

terdiri dari pihak Koperasi desa, lembaga leasing, dan pihak panitia karang taruna, tokoh masyarakat, dan risma di Desa Telogorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung

- b. Data Sekunder, yaitu kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari membaca buku-buku dan skripsi lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pemberian Hibah secara *real* terutama terkait praktik pemberian bantuan oleh koperasi Desa dan lembaga *leasing* dalam pembiayaan acara keagamaan.

#### **4. Populasi dan Sampel**

##### **a. Populasi**

Populasi adalah totalitas dari semua subjek atau objek yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian di tarik kesimpulan.<sup>17</sup> Populasi dari penelitian ini adalah 20 orang, delapan belas di antaranya adalah panitia penyelenggara kegiatan acara keagamaan dan satu orang dari koperasi Desa dan satu orang dari pihak lembaga *leasing* Desa Telogo Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&H* (Bandung: Alfabeta, 2006) h. 215.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto, bahwa apabila populasi kurang dari 100 orang maka lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi, jika subjeknya lebih besar 100 maka diambil 10 sampai 15%

Berdasarkan pemaparan di atas maka sampel dalam penelitian ini terdiri dari 20 orang. Demikian penelitian ini merupakan penelitian populasi

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Seorang peneliti harus dapat memilih dan menentukan metode yang tepat dan mungkin dilaksanakan (*feasible*) guna mencapai tujuan penelitiannya. Karena itu, seorang peneliti perlu mengenal berbagai metode ilmiah dan karakteristiknya. Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. Untuk mengumpulkan data dari sumber data, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik penelitian yang paling sosiologis dari semua teknik-teknik penelitian sosial. Ini karena bentuknya yang berasal dari interaksi verbal antara peneliti dan responden. Banyak yang mengatakan bahwa cara yang paling baik untuk menentukan



mengapa seseorang bertindak laku, dengan menanyakan secara langsung. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan, yang dimana dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang penulis teliti.<sup>18</sup> Data yang saya dapat merupakan hasil wawancara saya kepada para responden di Desa Telogorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data melalui penghimpunan data yang tertulis dan tercetak. Menurut Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan sebagainya.<sup>19</sup>

## 6. Teknik Pengolahan Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah;

---

<sup>18</sup>Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), h. 144.

<sup>19</sup>*Ibid.* h. 137.

- b. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan;
- c. Sistematisasi data (*Sistematising*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>20</sup>

## 7. Teknik Menganalisa Data

Data yang telah dikumpulkan dan diolah secara sistematis, maka selanjutnya diadakan teknik menganalisa data yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.<sup>21</sup>

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode berfikir induktif.berfikir secara induktif yaitu berfikir berangkat dari fakta fakta, peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta fakta yang khusus dan kongkrit ditarik generalisasi generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>22</sup> maksud dari metode ini yaitu suatu cara menganalisa data data yang berasal dari lapangan baik berupa fakta, atau peristiwa khusus yang berkaitan denga pelaksanaan praktik pemberian bantuan oleh

---

<sup>20</sup>*Ibid.* h. 119.

<sup>21</sup>*Ibid.* h. 91.

<sup>22</sup>*Ibid.* h.25

koperasi desa dan lembaga *leasing* dalam pembiayaan acara keagamaan di Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### a. Akad Dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian akad dalam Islam

Akad adalah berasal bahasa Arab *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan permufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fikih sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan dan kesepakatan.<sup>1</sup>

Menurut bahasa, akad adalah *ar-rabbth* (ikatan) mempunyai dua pengertian yaitu merupakan makna asal akad yang berarti menguatkan, mengikat, serta kebalikannya yang berarti melepaskan,<sup>2</sup> maksudnya ialah seseorang yang mengadakan sebuah perjanjian yang kemudian ada orang lain yang menyrtujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain,<sup>3</sup>

Adapun menurut istilah ada beberapa pendapat diantaranya adalah wahbah al-zuhayli dan kitabnya *al-fiqih al-Islami wa adillatuh* yang di

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman ghazaly.et al, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: kencana, 2010), h. 51

<sup>2</sup> Enang Hidyat, *Transaksi Ekonomi Syria*, (Bandung: Remaja Rosedakarya, 2016), h. 1

<sup>3</sup> Sholikul Hadi, *Fiqh Muamalah*, (Kudus: Nora Interprise, 2011), h. 45

dikutip oleh dimyauddin djuwaini bahwa akad adalah hubungan/keterkaitan antara ijab dan *Qobul* yang dibenarkan syara yang menetapkan keridhoan kedua belah pihak.

## 2. Dasar Hukum Akad

Di dalam ajaran Hukum Islam, Islam memperbolehkan adanya akad, yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةٌ الْآنَ نَعْمَ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ  
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: 1. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.<sup>4</sup>

Dasar hukum yang kedua juga berdasarkan Al-Qur'an surat **Ali Imran**

### **Ayat 76**

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Tajwid & Terjemah*, Cet ke-10. (Bandung; CV. Penerbit Deponegoro, 2018), h. 106.



بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: 76. (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Yakni janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah<sup>5</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Akad

#### a. Rukun Akad

Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh akad, rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

##### 1. *Aqid*

*Aqid* adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang lebih dari beberapa orang. Kedua belah pihak yang melakukan akad harus sudah mencapai usia *baligh*, bertanggung jawab dan dapat mengelola objek akad dengan baik.

---

<sup>5</sup>*Ibid.* , h. 59

## 2. *Ma'qud alaih*

*Ma'qud alaih* adalah benda-benda yang diakadkan. Seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah, dalam akad gadai, hutang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*.

## 3. *Maudhu ' al'aqad*

*Maudhu al'aqad* adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Seandainya berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.

## 4. *Sighat* (ijab dan *Qobul* )

*Sighat* (ijab dan *Qobul*) adalah ijab dan *Qobul*. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *Qobul* adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab *Qobul* adalah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan. Ijab dan *Qobul* boleh dinyatakan dalam bentuk ucapan maupun tulisan.<sup>6</sup>

Rukun di atas harus ada untuk adanya terjadinya akad, karena tidak memungkinkan untuk terjadinya suatu akad apabila tidak ada

---

<sup>6</sup> Dimyauddin djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010)

pihak yang tidak membuat akad, atau tidak ada ucapan pernyataan dari kedua pihak untuk sepakat melakukan kesepakatan berakad<sup>7</sup>

## **b. Syarat Akad**

Syarat-syarat terjadinya akad merupakan syarat yang melekat pada unsur-unsur pembentuk terjadinya sebuah akad yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat terjadinya akad diantaranya yaitu:

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, adalah syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad diantaranya yaitu:
  - a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak, tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan karena boros atau lainnya.
  - b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
  - c) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *Aqid* yang memiliki barang.

---

<sup>7</sup> Abdul muhammad, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 96.

- d) Tidak boleh melakukan akad yang dilarang syara“, seperti jual beli mulasamah.
- e) Akad dapat memberikan manfaat.
- f) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *Qobul*. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya.
- g) Ijab dan *Qobul* mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya *Qobul*. Maka ijab tersebut menjadi batal.<sup>8</sup>

Syarat pelaksanaan akad, dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga dia bebass beraktivitas dengan apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber *tasharuf* sesuai dengan ketentuan syara'.<sup>9</sup>

2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, adalah syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut

---

<sup>8</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.21.

<sup>9</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.44.

syarat idhafi (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat umum, seperti adanya saksi dalam pernikahan.<sup>10</sup>

#### 4. Macam macam akad

Akad Para ulama *Fiqh* mengemukakan bahwa akad itu dapat di bagi dan di lihat dari beberapa segi. Jika di lihat dari ke absahannya menurut syara", akad di bagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

##### a. Akad *Shahih*

Akad *Shahih* adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *Shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama *Hanafiyah* membagi akad *Shahih* menjadi dua macam,<sup>11</sup> yaitu:

- 1) Akad *nafiz* (sempurna untuk di laksanakan),  
adalah akad yang di langsunkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya,
- 2) Akad *mawquf*  
adalah akad yang di lakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan

<sup>10</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 21.

<sup>11</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Pers, 1982), h. 55.



dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang di langsungkan oleh anak kecil yang mumayyiz.

b. Akad tidak *Shahih*

Akad yang tidak *Shahih* adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak *Shahih* di bagi oleh ulama *Hanafiyah* dan *Malikiyah* menjadi dua macam<sup>12</sup>, yaitu sebagai berikut :

1) Akad *Bathil*

Akad *Bathil* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara". Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

2) Akad *Fasid*

Akad *Fasid* adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak di tunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan di jual, atau tidak di sebut brand kendaraan yang di jual, sehingga menimbulkan perselisihan antara

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

penjual dan pembeli. Ulama *Fiqh* menyatakan bahwa akad *Bathil* dan akad *Fasid* mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.

## 5. Tujuan akad

Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Tujuan akad selain untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, juga dalam rangka mengamalkan surat al-Baqarah ayat 275, karena di dalam firman tersebut ditegaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Namun apabila akad dilakukan niatnya bukan karena Allah dan hanya untuk keuntungan semata, maka hasilnya pun sesuai dengan apa yang diniatkannya<sup>13</sup>

### b. Hibah

#### 1. Pengertian Hibah

Hibah berasal dari kata wahaba-yahabu-hibatan, berarti memberi atau pemberian, dan sebuah akad pengelolaan pemberian hibah terhadap hartanya tanpa pengantian.<sup>14</sup> Secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada

<sup>13</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2012), h. 89-90.

<sup>14</sup> Wahab Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Ganesa Insani, 2011), h.657.

pihak lain pada masa masih hidup untuk dimiliki,<sup>15</sup> tidak ada tukaran dan tidak ada sebabnya.

Pemberian dengan bertujuan kebajikan dalam pergaulan tanpa mengharapkan apa-apa dari siapa pun,<sup>16</sup> dimana penyerahan kepemilikan ini mengandung arti bahwa yang diserahkan itu adalah milik secara penuh, dengan demikian berlaku untuk selamanya. Kata pihak lain disini berlaku untuk orang-orang secara perorangan maupun kelompok atau lembaga sedangkan tanpa imbalan membedakannya dari jual beli.<sup>17</sup> Hibah dalam bidang hukum syara adalah sebagai akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan hak milik seseorang kepada orang lain yang tidak menghendaki adanya imbalan,<sup>18</sup> baik hibah terhadap orang yang derajatnya lebih rendah atau lebih tinggi kedudukannya.

Dilihat dari sudut lain hibah mempunyai aspek vertikal dan horizontal. Aspek vertikal merupakan suatu hubungan manusia dengan tuhan yang memiliki dimensi taqarrub artinya bisa diungkapkan didalam hal ini bahwa dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah Swt. Karena semakin kita berderma dan memberi maka semakin memperkuat serta memperkokoh keimana. Aspek horizontal ialah hubungan antara sesama

---

<sup>15</sup> Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2011), h. 314.

<sup>16</sup> Amir Syaifudin, Garis-Garis Besar Fiqih, ( Jakarta : Kencan, 2010), h.230.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Al-sayid Sabiq, Fiqih Al- Sunnah, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1983), h.388.

manusia dan lingkungannya dimana dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara kaum yang sedikit memiliki kelebihan harta dengan yang tidak mampu serta mengurangi rasa kecemburuan sosial.<sup>19</sup>

Sifat taqarrub kepada Allah Swt dilakukan dalam rangka meningkatkan kepedulian sosial, ketaqwaan serta kesadaran bahwa disetiap harta yang dimiliki seseorang terdapat sebagian hak orang lain untuk diberikan guna saling membantu sesama. Seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hadid ( 57 : 7 )

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۚ فَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

Artinya 7. berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya[1456]. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.<sup>20</sup>

Pengertian hibah dalam Ensiklopedia Hukum Islam hibah adalah Pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada

<sup>19</sup> Wahab Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Ganesa Insani, 2011), h.65

<sup>20</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Tajwid & Terjemah*, Cet 10. (Bandung; CV, Penerbit Deponegoro, 2018), h.538

Allah Swt tanpa megharapkan balasan.<sup>21</sup> Hal yang membedakan antara hibah dengan konsep hadiah bahwa hadiah merupakan pemberian sesuatu yang mengharuskan si penerimanya untuk mengganti (dengan yang lebih baik).<sup>22</sup> Berdasarkan tuntunan islam meyatakan bahwa hibah merupakan perbuatan yang baik oleh karena itu perbuatan hibah seyogyanya dilandasi rasa kasih sayang, bertujuan baik serta objek hibah yang halal, kemudian setelah hibah diterima oleh penerima hibah tidak dikhawatirkan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti malapetaka dan permusuhan bagi pemberi maupun penerima hibah maupun pihak-pihak yang ikut andil didalamnya. Definisi hibah menurut termonologi yang diuraikan dengan berbeda-beda antara lain:

- a. Madzhab Maliki adalah “memberikan hak materi dengan tanpa mengharap imbalan atau ganti. Pemberian semata-mata hanya diperuntukan kepada orang yang diberinya, tanpa mengharap adanya imbalan”.
- b. Madzhab Syafi’I adalah Pemberian hanya sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan qabul pada waktu si pemberi masih hidup pemberian dimaksudkan untuk menghormati atau memuliakan seseorang dan mendapat ridha Allah Swt.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Abdul Aziz Dahlan, Et Al, *Enslikopedia Hukum Islam*, (Jakarta : Ihtiar Van Hoeve, 1996), h. 540.

<sup>22</sup> Sayyid Sabid, *Fiqih Sunnah 5*, ( Jakarta : Pena Pundi Aksara. 2011), h. 449-450.

<sup>23</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata*, (Bw), h. 145-146.



- c. Madzhab Hanafi hibah “disertakan memberikan hak milik suatu benda dengan tanpa ada syarat harus mendapatkan imbalan ganti pemberian ini dilakukan pada saat si pemberi hibah masih hidup. Dengan syarat benda yang akan diberikan itu adalah sah milik si pemberi”.
- d. Syeh Muhammad Ibnu Qasim Al-Gazali mengutarakan bahwa “hibah adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimintakan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti, meskipun dari jenjang atas”.<sup>24</sup>
- e. Menurut Sayyid Sabiq hibah adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa adanya imbalan.
- f. Menurut Kompilasi Hukum Islam KHI Pasal 171 huruf (g) pemberian hibah adalah “pemberian sesuatu secara dengan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang yang masih hidup untuk dimiliki”. Sedangkan menurut Pasal 210 Kompilasi hukum Islam yaitu : pada ayat (1) menyatakan bahwa “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan “harta benda yang dihibahkan harus merupakan

---

<sup>24</sup> Syeh Muhammad Ibnu Qasim Al-Gazali, *Fiqih Al- Qarib Al-Mujib*, (Indonesia : Dar Al-Ilya Al- Kitab, Al-Arabiah,Tth), h.39.

hak dari penghibah”. Dengan demikian apabila seseorang yang menghibahkan harta yang bukan merupakan haknya, maka hibahnya menjadi batal.

- g. Hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1666 dan pasal 1667 “Merupakan suatu perjanjian dengan nama si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penghibahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah diantara orang-orang yang masih hidup, hibah itu hanya mengenal benda-benda yang sudah ada, jika benda itu meliputi benda yang akan ada dikemudian hari maka mengenai hal ini hibahnya batal”.<sup>25</sup>

- h. Hukum adat menjelaskan hibah adalah “harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikan diantara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup, dengan tujuan untuk menghindari percecokan yang akan terjadi diantara anak-anaknya itu apabila iya telah meninggal dunia”. Penghibahan itu sering terjadi mulai anak-anak mulai berdiri sendiri atau ketika anak-anak mereka sudah mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri. Penghibahan ini terjadi dimungkinkan jika sebagai akibat karena kekhawatiran pihak pemberi hibah sebab ibu dari anaknya terebut adalah ibu sambung atau ibu tiri, atau juga diantara kalangan anak-

---

<sup>25</sup> KUHP Perdata Dan KUHAP Perdata, h. 375

anaknya itu terdapat anak angkat yang mungkin disangkal keanggotaanya sebagai ahli waris.<sup>26</sup> Hibah dikategorikan sebagai pemberian biasa, tidak bisa dikatakan sebagai warisan karena pengkatogorian itu tampak bahwa hibah adalah jenis pemberian yang dilakukan ketika seseorang pemberi hibah masih hidup serta pula adanya perbedaan unsur-unsur diantara keduanya.<sup>27</sup>

Definisi yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya hibah terdapat beberapa unsur antara lain sebagai berikut :

- a. Merupakan akad atau perjanjian.
- b. Adanya pemindahan suatu kepemilikan, yang terjadi pada saat kedua belah pihak masih hidup. Pemindahan dari benda yang dihibahkan mempunyai nilai.
- c. Penguasaan benda secara penuh kepada pihak penerima hibah setelah dilakukan penyerahaan harta hibah.
- d. Tidak ada ganti rugi dalam pemindahan kepemilikan tersebut.
- e. Hibah dapat dilaksanakan oleh seseorang kepada keluarganya maupun orang lain, oleh seseorang kepada badan-badan sosial tertentu dan juga kepada orang yang berserikat kepada yang lain.

---

<sup>26</sup> Tamakiran S, Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia*,(Jakarta : Pernada Media Grup, 2008), h.123.

<sup>27</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h.138

f. Hibah dilakukan sebagai bentuk seorang hamba yang melakukan taqarrub kepada Allah Swt. Hibah dinyatakan sebagai salah satu bentuk saling tolong-menolong dengan sesamanya untuk saling menghargai dan menghindari terjadinya kesenjangan sosial, serta sebagai tindakan bernilai positif, harta yang berlebih, lebih baik diberikan kepada saudara ikatan darah, kerabat dekat, anak dan tetangga ataupun orang lain dengan begitu akan terwujudnya kemaslahatan dan memberikan manfaat yang banyak sebab hibah termasuk jenis ibadah yang agung yang senantiasa meresap didalam dada, menguatkan hubungan kekerabatan. Para ulama fiqh yaitu Imam Syafi'i bersepakat mengatakan bahwa hukum hibah adalah sunnah. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa (4:4)

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya 4. berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan[267]. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan

senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.<sup>28</sup>

## 2. Dasar Hukum Hibah

Dalam Al-Quran kata hibah digunakan dalam konteks penjelasan tentang pemberian sebuah anugrah dan rahmat yang diberikan Allah Swt kepada para utusan-utusannya atas doa-doa yang dipanjatkan oleh para hambaNya, terutama para nabi yang menjelaskan sifat-sifat Allah Swt yang memberi karunia dan maha pengasih. Untuk itu didalam mencari dasar-dasar hukum hibah dalam Al-Quran seperti yang dimaksud dalam kajian ini secara jelas, yang dapat dijadikan petunjuk dan landasan anjuran secara umum agar seseorang memberikan sebagian hartanya kepada orang lain.<sup>29</sup> Begitu pula dijelaskan dalam hadis, yang mana kita harus menerima hadiah yang diberikan seseorang walaupun kecil nilainya, saling memberi hadiah maka menghilangkan rasa iri, dan dalam menerima hadiah tidak menganggap sepele atas pemberian meskipun hanya berupakulit kambing.<sup>30</sup> Dasar hukum hibah bersumber dan dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah (2 : 262)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى  
هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

<sup>28</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Tajwid & Terjemah*, Cet 10. (Bandung; CV, Penerbit Deponegoro, 2018), h. 77

<sup>29</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 467.

<sup>30</sup> Sabiq Al-Sayid, *Fiqh Al-Sunnah*, ( Bairut : Dar Al Fikr, 1983), h. 388



Artinya 262. orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.<sup>31</sup>

Dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Imran ( 3 : 92)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ  
 عَلِيمٌ

Artinya 92. kamu sekali kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya<sup>32</sup>

Penjelasan dalam Al-Quran banyak sekali menggunakan istilah yang memiliki konotasi menganjurkan manusia yang telah dikarunia dengan banyak rezeki untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan. Dari kata nafkah, zakat, wasia, sadaqah, wakaf dan juga hibah. Kendati bermakna bahwa manusia di perintahkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya agar saling berbagi bertujuan untuk kemaslahatan seluruh umat.

<sup>31</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Tajwid & Terjemah*, Cet 10. (Bandung; CV, Penerbit Deponegoro, 2018), h.44

<sup>32</sup> *Ibid.* h.62

Dasar hukum Hibah yang bersumber dari Hadis : Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta'

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَّاسَانِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا وَتَذْهَبُ الشَّحْنَاءُ (رواه مالك)

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Malik dari 'Atha bin Abu Muslim Abdullah AlKhurasani berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:"Hendaklah kalian saling berjabat tangan, niscaya maka akan hilanglah kedengkian. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya akan saling mencintai dan menghilangkan permusuhan".(HR. Malik No. 1413).

Dasar hukum Hibah yang kedua bersumber dari Hadis riwayat Ahmad

مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، وَلَا إِشْرَافٍ نَفْسٍ فَلْيَقْبَلْهُ، وَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقُ سَاقِهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ (رواه أحمد)

Artinya : “Barangsiapa mendapatkan kebaikan dari saudaranya yang bukan karena mengharap-harap dan meminta-minta , maka hendaklah dia menerimanya dan tidak menolaknya, karena itu adalah rezeki yang diberikan kepada Allah”. (HR.Ahmad No 2251).

### 3. Rukun dan syarat hibah.

#### a. Rukun Hibah

Pengertian rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan sebelum melakukan kegiatan ibadah.<sup>33</sup> Dalam hibah terdiri dari tiga rukun dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Dua Orang Yang Berakad (pemberi harta hibah dan penerima harta hibah) Pemberi hibah (al-wahib) : adalah seseorang pemilik barang atau harta yang akan dihibahkan, telah dapat membedakan mana perbuatan baik (tabarru) dan perbuatan buruk serta seseorang yang dapat mempergunakan hartanya secara mutlak. Dari pengertian ini tidak sah bagi seseorang menghibahkan hartanya yang bukan miliknya. Begitu pula tidak sah apabila hibah dari anak kecil dan orang gila. Keduanya bukan termasuk yang mengerti tentang perbuatan baik (taburru) dan juga tidak dikategorikan sebagai pemilik mutlak atas barang tersebut. Selain itu hibah tidak sah dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai hak untuk membelanjakan hartanya sendiri karena kebodohan atau karena kepailitan. Penerima hibah adalah orang yang menerima pemberian harta hibah, penerima hibah haruslah orang yang layak untuk memiliki harta yang dihibahkan. Oleh sebab itu, hibah sah bagi setiap

---

<sup>33</sup> Nardisyah Hawari, Fiqih Muamalah, (Jakarta : Amzah, Sinar Grafika Offset, 2010), h. 22.

manusia yang dilahirkan dan orang yang belum taklif<sup>34</sup> Seperti anak kecil, maka bagi yang belum taklif walinyalah yang menerima hibah tersebut

## 2) Ijab Kabul

Pengertian ijab dan kabul secara umum antara lain : Ijab adalah suatu pernyataan kehendak yang pertama kali muncul dari suatu pihak untuk melahirkan suatu tindakan hukum, yang dengan pernyataan kehendak tersebut ia menawarkan penciptaan tindakan hukum diman apabila penawaran tersebut diterima oleh pihak lain maka terjadilah akad. Sedangkan kabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan yang denganya tercipta suatu akad.

Beberapa kalimat yang termasuk ijab (penyerahan) dalam pemberian hibah diantaranya, saya menghibahkan kepadamu (wahabtuka), maka saya memberikan kepadamu (nahaltuka) saya menyerahkan kepemilikan ini kepadamu tanpa dibayar (mallatikabilaTsaman) saya memberikan kepadamu (A'thaituka) saya memberikan makanan ini (Ath'matuka), dan saya berikan baju ini kepada mu.<sup>35</sup> Diantara kalimat-kalimat diatas, ada yang secara jelas menunjukan pengertian hibah karean secara langsung menggunakan kata hibah (memberikan) sebagian yang lain sama pada segi makna.

---

h. 101 <sup>34</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta :PT Mizanpublik, 2009),

<sup>35</sup> *Ibid.*

Kalimat-kalimat tersebut menunjukan makna penyerahan kepemilikan pada suatu keadaan tanpa ada penggantian. Seharusnya pelaksanaan Shigat (ijabkabul) dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Bersambungnya kabul setelah ijab, tidak ada pemisah yang dikenal secara adat yang memisahkan keduanya.
- b. Tidak diikat dengan syarat apapun. Contohnya dalam pemberian hibah “seseorang berkata “jika zaid datang, saya hibahkan baju ini untuk kamu”. Hibah merupakan menyerahkan kepemilikan. Menyerahkan kepemilikan tidak diperbolehkan dengan sesuatu yang tidak pasti antara jadi dan tidak jadi, ijab seperti ini tidaklah sah. Menurut Ulama Hanafiah “jika syarat tersebut termasuk yang dapat menyebabkan menghalangi terjadinya penyerahan pemilikan barang pada saat transaksi berlangsung”, seperti contoh dijelaskan iya manghalangi sahnya hibah, akan tetapi jika ia tidak menghalangi terjadinya penyerahan kepemilikan pada saat transaksi, seperti ucapan seseorang “saya berikan baju ini dengan syarat engkau membelinya”. Maka hibahnya menyalahi tuntutan akad.
- c. Tidak terikat dengan waktu contohnya dalam pemberian hibah seseorang berkata, “saya memberikan buku ini kepada mu selama satu bulan atau satu tahun”. Akad dengan ijab demikian tidak sah karena syaratnya memindahkan tuntutan akad, yakin karena yang

seharusnya menyerahkan kepemilikan secara mutlak untuk selamanya.<sup>36</sup>

Menurut Sayyid Sabiq mengatakan bahwa hibah baru dianggap sah dengan melalui ijab kabul, sebagai contoh ‘penghibah berkataaku hibahkan kepadamu, aku berikan kepadamu, sedang penerima berkata. Iya aku terima’. Pendapat ini sesuai dengan para Ulama lainnya seperti Imam Malik, Syafi’I serta Hambali sedangkan Imam Abu Hanafiah mengatakan penyerahan hibah hanya cukup dengan ijab saja, tidak perlu diikuti dengan kabul, dengan pernyataan lain iya menyatakan bahwa hibah bahwa cukup pernyataan sepihak.<sup>37</sup>

3) Barang Yang Dhibahkan Rukun ketiga yaitu barang atau harta yang dihibahkan, Mazhab Syafi’ah terdapat kaidah sesuatu yang boleh diperjual belikan, boleh pula dihibahkan. Dari kaidah ini maka barang atau harta yang dapat dihibahkan sebagai berikut:

- a. Barang hibah harus ada dalam penyerahan, tidak sah menghibahkan barang yang tidak ada pada saat penyerahaan.
- b. Harta yang dihibahkan harus harta yang halal (mutaqawwim).

---

<sup>36</sup>*Ibid.* h.104

<sup>37</sup> Abdul Manaf, *Aneka Masalah Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana. 2006), h.



c. Barang yang dihibahkan harus milik orang yang menghibahkannya.

Tidak sah menghibahkan harta yang bukan miliknya, seperti harta milik umum, contohnya “saya hibahkan ikan ini kepadamu padahal ikannya masih didalam laut atau ditempat umum lainnya”,<sup>38</sup> maka hibah ini tidak sah.

d. Barang yang telah dihibahkan dapat dikuasai oleh penerima hibah.

e. Barang yang dihibahkan hendaknya barang sendiri tidak terkait atau tidak dipergunakan bersama dengan harta lain yang tidak dihibahkan.

Hukum hibah tidak bisa ditetapkan kecuali adanya pengambilan barang dengan sempurna. Tujuannya adalah agar harta tersebut bisa dipergunakan secara mutlak oleh pihak penerima hibah, hal ini tidak akan terwujud jika harta yang dihibahkan sedang dipergunakan bersama oleh sebab itu akad hibah ini tidak sah.<sup>39</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat 2 menyatakan bahwa:

“Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah” Jika menghibahkan benda yang dimiliki atau terkait dengan orang lain tidak sah hukumnya. Mengenai benda yang boleh untuk dihibahkan meliputi segala macam yang prinsipnya benda berwujud dan dapat diperjual belikan namun terdapat pengecualian yaitu:

---

<sup>38</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta :PT Mizanpublik,2009), h.109

<sup>39</sup> *Ibid.*

- a) Barang-barang yang kecil seperti dua atau tiga butir biji beras, tidak sah dijual tetapi sah diberikan.
- b) Barang yang tidak diketahui tidak sah untuk dijual tetapi sah untuk diberikan.
- c) Kulit bangkai sebelum disamak tidak lah sah untuk dijual tetapi sah untuk diberikan<sup>40</sup>

#### **b. Syarat Hibah**

Pengertian syarat adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu pekerjaan ibadah. Yang menjadi syarat dalam pemberian hibah antara lain :

1. Syarat bagi pemberi harta hibah (al-wahib).
  - a. Seorang pemberi hibah (al-wahib) adalah orang yang berhak mutlak sebagai pemilik barang yang akan dihibahkan
  - b. Pemberian tidak terkait apapun atau dibatasi oleh sesuatu hal atas haknya.
  - c. Pemberian hibah yang diberikan oleh pemberi hibah dilakukan dengan tidak dalam keadaan terpaksa, karena dalam akad hibah mensyaratkan keridhan. Jadi harus memiliki kebebasan untuk menghilangkan bendanya.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 328.

- d. Dilakukan oleh pemberi hibah yang sudah aqil-balik (dewasa dan berakal).<sup>41</sup> Dan dalam keadaan sehat serta mampu bertindak hukum.

## 2. Syarat bagi penerima hibah (al-mauhud lahu).

- a. Penerima hibah (al-mauhud lahu) harus benar-benar ada ditempat pelaksanaan pada saat pemberian hibah dilakukan.
- b. Dapat memanfaatkan dan memiliki mutlak dalam penguasaan harta pemberian hibah.
- c. Dalam hal ini tidak dipersoalkan apakah ia anak-anak atau dewasa dalam siapa yang menerima hibah.<sup>42</sup>

## 3. Syarat harta yang dihibahkan Yang menjadi syarat suatu barang dapat di jadikan objek hibah adalah para ahli hukum islam bersepakat anatara lain:

- a. Harta yang dihibahkan haruslah harta yang berwujud, karena bila tidak berwujud akan terjadi kesalah pahaman dan ketidak jelasan. Contohnya “seseorang menghibahkan anak kambing yang masih berada dalam kandungan induknya akad hibah semacam ini tidak sah sekalipun ia akan memberikannya ketika dilahirkan ataupun diperah”. Karena tidak ada secara hukum bisa saja kandungan pada kambing

<sup>41</sup> Kawi Sabian, *Hukum Waris Islam*, ( Malang : UM Press, 2007), h.70.

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fikis Sunnah*, ( Berut : Darul Fikri , 1983), h.389.

tersbut bukan karena mengandung janin tetapi bisa disebabkan karena hal lain.

- b. Benda yang dihibahkan memiliki nilai.
- c. Barangnya dapat dimiliki zatnya yakni bahwa yang dihibahkan itu adalah apa yang bisa dimiliki, diterima peredaranya dan kepemilikanya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menghibahkan air sungai, ikan dalam laut dan burung di udara.
- d. Benda yang dijadikan objek hibah tersebut dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah. Barangnya terpisah, menurut Ulama Hanafi'iyah "hibah tidak diperbolehkan terhadap barangbarang yang tercampur dengan orang lain."
- e. Penerima yang menjadi pemegang hibah atas adanya izin dari pemberi hibah (wahib).
- f. Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (al-qadah) penerima hibah. Ulama Hanafiah dan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa mereka bersepakat penguasaan secara langsung oleh pihak penerima hibah karena keberadaanya sangatlah penting, dan hibah di anggap sah

ketika adanya ijab dan kabul yang harus bersamaan dengan al-qadah (bolehnya terhadap penguasaan terhadap barang tersebut)<sup>43</sup>

Al-qadah dibagi atas dua macam pembagian, pembagia tersebut antara lain: al-qadah secara langsung merupakan penerima hibah langsung menerima harta yang dihibahkan dengan disyaratkan seseorang penerima hibah yang telah cakap dalam perbuatan hukum dan al-qadah melalui kuasa pengganti adalah penerima hibah dengan disyaratkan bahwa apabila yang menerima hibah adalah orang yang tidak tahu dan cakap hukum.<sup>44</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 686 diperkuat mengatakan bahwa agar kepemilikan harta hibah tersebut sempurna dengan menyatakan dalam ayat (1) suatu akad hibah dapat terjadi dengan adanya ijab atau pernyataan (2) kepemilikan menjadi sempurna dengan adanya penyerahan barang (3) ijab dalam hibah dapat dinyatakan dalam kata-kata, tulisan atau isyarat yang mengandung arti beralihnya harta secara cuma-cuma.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Rahmad syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h.247.

<sup>44</sup> Zakiah Derajad, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta : PT Dana Bakti Wakaf, 1995), h.181.

<sup>45</sup> Ditjen Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2013), h.32.

## **b. Pelaksanaan Akad Hibah**

Pada dasarnya pelaksanaan akad hibah dilaksanakan sesuai berdasarkan pada pelaksanaan rukun dan syarat pemberian hibah hibah yang didalamnya dijelaskan secara umum bahwa sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya berdasar cakupan rukun dan syarat yang terdiri dari orang yang memeberi hibah (wahib), menerima hibah (mauhud lan), adanya objek yang di akadkan dan juga akad ( shighat ). Akad hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan kabul yang dapat dilakukan secara sempurna, seperti seseorang berkata “saya hibahkan benda ini kepadamu” yang tidak akan lepas dari syarat, waktu ataupun manfaat. Dan pula pelaksanaan akad hibah dapat dilaksanakan dan dianggap sah bila terpenuhinya syarat hibah antarlain :

1. Hibah dari harta yang dibolehkan.
2. Terpilih dengan sungguh-sungguh.
3. Harta yang dapat dijual belikan
4. Tanpa adanya pergantian.
5. Orang yang sah memilikinya.
6. Sah menerimanya.
7. Walinya sebelum diberi dipandang cukup waktu.
8. Menyempurnakan pemberian



9. Tidak di sertai syarat waktu tertentu dan pemberi hibah dianggap sudah mampu, balig dan cakap.<sup>46</sup>

Berkaitan pelaksanaan akad hibah selain berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat yang telah di jelaskan sebelumnya akad hibah dapat terlaksana dan dianggap sah dengan mencakup bahwa akad dilaksanakan dengan bersambungunya Kabul setelah ijab, akad dilakukan dalam satu majelis, pelaksanaan akad harus bersambung tidak adanya pemisah yang dapat membatalkan akad, pelaksanaan akad karena adanya keridahan masingmasing pihak apalagi dalam pelaksanaan akad pemebrian hibah haruslah dilaksanakan dengan dasar saling tolong menolong dan mendapat keridahan dari Allah Swt

### c. **Macam-Macam Hibah**

Macam-macam hibah antara lain diabagi antara lain:

1. Hibah bersyarat Merupakan hibah yang dilaksanakan dengan dikaitkan oleh suatu persyaratan, seperti pembatasan penggunaan barang oleh pihak penerima hibah kepada pihak penerima hibah.
2. Hibah Ruqba Adalah pemberian hibah dengan persyaratan penguasaan apabila seseorang menghibahkan sesuatu kepada seseorang lain, contohnya “dalam pemberian terdapat persyaratan jika aku mati sebelum kamu maka rumahku yang telah kuberikan menjadi milikmu dan jika engkau mati sebelum aku, maka rumahmu menjadi milik ku.” atau ia berkata “rumah ini menjadi milikmu sepanjang hidupmu dan jika engkau mati sebelum aku,

---

<sup>46</sup> Syafi Rahmad, *Fiqih Muamalah*, ( Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 246.

maka rumah itu kembali kepadaku, dan jika aku mati sebelum kamu, maka rumah tersebut menjadi milik mu”.<sup>47</sup>

3. Hibah Al-umra Merupakan pemberian hibah jangka waktu contohnya :“seorang penghibah berkata aku memintamu untuk memakmurkan rumahku atau kuhibahkan pemakainya rumahku sepanjang hidupmu”.
4. Hibah Al-musya Hibah Al-musya” adalah hibah yang terjadi jika seorang memiliki sebagian sesuatu harta yang tidak pasti (ukurannya atau jumlahnya), kemudian menghibahkannya kepada orang lain atau orang tersebut memiliki sesuatu, kemudian menghibahkannya kepada dua orang atau lebih.
5. Hibah Manfaat Adalah pemberi hibah boleh memanfaatkan benda yang dihibahkan selama penerima hibah masih hidup. Apabila penerima hibah meninggal maka benda yang dihibahkan harus kembali kepada yang memberi hibah.<sup>48</sup>
6. Hibah Barang Adalah memberikan harta atau barang kepada pihak yang lain termasuk seluruh materi dan nilai kemanfaatannya serta tidak mengharapkan suatu imbalan bagi pemberi terhadap penerima hibah.
7. Hibah Hutang Merupakan hibah yang dilakukan oleh seseorang atas haknya berupa suatu hutang kepada orang lain yang tidak memiliki hutang atau disebut dengan pihak ketiga.

---

<sup>47</sup> Syaikh Abu Jabir Al-Jazairi, *Pedoman hidup Harian Seorang Muslim*, (Jakarta : Ummul Qura, 2016), h.800.

<sup>48</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Rajawali Press, 2016), h.307.

#### **d. Pemberian Hibah Bersyarat**

Hakikat dari dilakukannya pemberian hibah yaitu pemberian dengan tidak mengharapkan balasan apapun, dimasa waktu masih hidup dengan cumacuma yang memiliki maksud untuk saling memuliakaan dan keridahan Allah Swt dalam pandangan ini pelaksanaan hibah harus dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan baik dalam bidang hukum pelaksanaan hibah maupun dengan berlakunya kesesuaian baik cakupan pelaksanaan rukun maupun syarat (yang memeberi hibah, penerima hibah, objek hibah dan akad) dilakukannya hibah yang paling penting lagi dalam hal ini adalah pelaksanan akad atau shight.

Kaitannya dalam akad seringkali para pihak memasukan kalsual-klasual yang dalam sesuatu atau lain cara, berkaitan dengan objek akad kedalam akad yang mereka buat kasual ini ada yang hanya sekedar sifat bagi suatu objek seperti klasual yang mensyaratkan warna tertentu untuk mobil yang akan dibelinya. Ada pula klasual yang merupakan unsur berdiri sendiri diluar objek seperti syarat adanya penanggung atau syarat menyerahkan jaminan dalam akad hutang piutang atau syarat bahwa barang diantarkan kerumah pembeli dalam akad jual beli.

Klasual-klasual yang dimasukkan kedalam akad seperti dikemukakan diatas dalam hukum perjanjian syariah disebut syarat-syarat penyertaan akad atau syarat-syarat yang berbarengan dalam akad. Syarat penyertaan akad ini ada yang sah untuk diperjanjikan dan ada yang tidak sah untuk diperjanjikan.

Yang tidak sah diperjanjikan disebut syarat-syarat fasid. Syarat-syarat yang tidak sah ini adalah syarat-syarat yang pemasukannya dalam akad mengakibatkan terjadinya gharar atau syarat-syarat itu sendiri bertentangan dengan ketertiban umum, hukum dan kesusilaan syariah. Dikemukakan intisari doktrin syarat sebagaimana diadopsi dan dirumuskan oleh KUHPerdara yang bersumber kepada prinsip syariah, bahwa syarat-syarat yang dibenarkan untuk dimasukkan sebagai klasual didalam akad adalah :

Pertama, syarat yang memperkuat konsekuensi hukum bahwa syarat tersebut merupakan akibat hukum akad sendiri yang ditentukan oleh hukum syariah, sehingga apakah syarat itu dimasukkan atau tidak dimasukkan kedalam akad sebagai klasual tidak menambah hal baru dalam isi akad. Karena akad itu adalah konsekuensi akad yang ditetapkan oleh hukum akad itu sendiri. Yang kedua syarat yang selaras dengan akad adalah suatu akad yang tidak merupakan konsekuensi akad artinya tidak ditetapkan oleh hukum syariah, melainkan diperjanjikan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan dalam rangka memperkuat (jaminan) pelaksanaan akad. Syarat ini dalam hukum perjanjian Islam meliputi tiga macam yaitu : (1). Syarat adanya penanggung dalam akad yang melibatkan utang piutang, (2). Syarat jaminan (gadai) dan (3). Syarat hawalah. Ketiga syarat yang telah berlaku dalam adat kebiasaan yaitu syarat yang bukan merupakan konsekuensi akad dan bukan pula merupakan penguat pelaksana akad, melainkan syarat yang telah berlaku dalam praktik dan telah bisa diperjanjikan akad oleh masyarakat. Keempat,

syarat yang mengandung manfaat bagi salah satu dari kedua pihak atau kepada pihak ketiga selain tidak dilarang oleh hukum, tidak bertentangan dengan ketertipan umum dan kesusilaan.<sup>49</sup> Syarat keempat ini menunjukkan kepada syarat lain dari yang tiga disebutkan diatas.

Syarat-syarat selain yang disebutkan dan diuraikan seblumnya tidak sah untuk diperjanjikan dan karena itu disebut syarat fasid. Contohnya dalam “jual beli di sayaratkan penjual tidak bertanggung jawab atas kecacatan barang yang telah dibeli oleh pembeli”. Karena syarat ini bertentangan dengan konsekuensi hukum akad yang ditetapkan hukum syariah.

Adapun syarat-syarat fasid dimaksudkan kedalam suatu akad, maka syarat itu dipandang tidak ada (sia-sia), dan akad tetap sah sepanjang tidak terbukti bahwa syarat tersebut merupakan motif yang mendorong dibuatnya akad yang bersangkutan. Apabila pihak yang mengajukan syarat seperti itu dapat membuktikan bahwa dibuatnya akad adalah syarat tersebut, maka akadnya menjadi batal.

Berdasarkan hibah yang telah diuraikan pada halaman sebelumnya, maka dengan ini yang menjadi pembahasan bagaimana pelaksanaan hibah bersyarat atau hibah dengan tawaran kerjasama dengan meminta mempromosikan lembaga koperasi desa dan lembaga *leasing* di dalam acara keagamaan yang mereka berikan hibah berupa bantuan uang tunai untuk

---

<sup>49</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.214.

pelaksanaan acara keagamaan itu di Desa Telogorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur

Hibah bersyarat Merupakan hibah yang dilaksanakan dengan dikaitkan oleh suatu persyaratan, seperti pembatasan penggunaan barang oleh yang diberikan pihak pemberi hibah kepada pihak penerima hibah. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam suatu akad atau perikatan mengandung tambahan persyaratan tertentu dijelaskan berdasarkan pasal 1253 :

“suatu perikatan bersyarat ialah manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi baik secara menangguhkan perikatan hingga terjadi peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.”

Berdasarkan Pasal 1254 semua syarat yang bertujuan yang tidak mungkin dilaksanakan, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan baik, atau sesuatu yang dilarang berdasarkan undang-undang yaitu batal dan berakibat bahwa perjanjian yang digantungkan padanya tak berdaya. Pasal 1255 suatu syarat yang bertujuan tidak melakukan sesuatu yang tidak mungkin terlaksana, membuat perikatan yang digantungkan padanya tak berdaya. Pada Pasal 1258 adalah :

“Jika suatu perikatan bergantung pada syarat bahwa suatu peristiwa akan terjadi didalam suatu waktu tertentu, maka syarat tersebut dianggap tidak ada ,



apabila waktu tersebut telah lampau dengan tidak terjadinya peristiwa tersebut. Jika waktu tidak ditentukan, maka syarat tersebut setiap waktu dapat terpenuhi dan syarat tersebut dianggap tidak ada sebelum ada kepastian bahwa peristiwa itu akan terjadi”

Hibah dengan penambahan syarat tertentu telah banyak dilakukan oleh bangsa arab sejak lama sebelum adanya hukum yang melarangnya. Hibah dengan adanya tambahan persyaratan tertentu dibagi atas tiga macam pembagian yaitu :

1. Hibah disertai dengan syarat penguasaan (hibah ruqba). Adalah pemberian hibah dengan syarat penguasaan, contohnya “ketika seseorang mengatakan rumah ini untukmu secara ruqba (saling menunggu kematian, jika si pemberi hibah telah meninggal terlebih dahulu, maka barang miliknya yang diberi, sebaliknya jika si penerima meninggal terlebih dahulu barang kembali kepada pemilik”.<sup>50</sup> Jadi rumah tersebut milik orang yang terakhir meninggal diantara keduanya. Hibah disertai dengan syarat kemanfaatan ialah seperti pernyataan “Rumah ini untuk kamu dan tempat tinggal saya”.<sup>51</sup> Menurut teori Imam Hanafiya hibah seperti ini hakikatnya adalah pinjaman karena pemiliknya diperbolehkan mengambilnya kapan saja dia mau dan masih boleh ikut memanfaatkan hibah tersebut dengan demikian hibahnya batal tetapi dipandang sebagai pinjaman.

---

<sup>50</sup> Syafi Rahmad, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h.245

<sup>51</sup> *Ibid.*, 246

2. Hibah disertai syarat waktu (hibah Umra) . Merupakan pemberian hibah dengan syarat jangka waktu. Contohnya “saya hibahkan rumah ini kepada kamu selama saya hidup atau selama kamu hidup”.<sup>52</sup> Umra Memiliki tiga macam sifat yaitu bersifat kekal seperti ini milikmu dan milik anak keturunanmu sepeninggalanmu, berlaku seumur hidup seperti ini menjadi milikmu selama engkau masih hidup atau selama aku masih hidup dan pemberian hibah dengan mensyaratkan akan menarik kembali hibahnya setelah seseorang diantara keduanya meninggal dunia<sup>53</sup> Jenis hibah diatas menurut beberapa Ulama seperti Imam Bukhori, Muslim dan teori Imam Ahmad menyatakan bahwa “peganganglah ditanganmu harta-hartamu, janganlah mensyaratkan suatu pemberian dengan umurmu, sebab yang memberi dengan mensyaratkan umur harta tersebut adalah bagi yang diberi” maka dapat disimpulkan bahwa hibah yang dilakukan ini hibah yang objek hibahnya sah namun adanya syarat waktu tersebut yang mengakiatkan syarat yang fasid serta menjadikan hibah yang batal atau tidak sah. Karena pada dasarnya pemberian hibah adalah pemberian yang sebenar-benarnya secara langsung dan sempurna kepada orang yang menerima hibah oleh sebab itu apabila dalam suatu hibah mensyaratkan baik pembatasan suatu penggunaan kemanfaatan barang hibah, kepemilikan harta yang tidak secara keseluruhan mutlak dapat dimiliki oleh

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, 245

<sup>53</sup> Abdulah Bin Abdulrahman Ali Bassam, *Syariah Hadist Pilihan Bukhari – Muslim*, (Jakarta :Darul Falah, 2004), h.712.

penerima hibah, pemberian jangka waktu yang digantungkan dengan tidak jelas dan bahkan apabila terdapat suatu hal yang mengakibatkan apabila suatu pemberian hibah itu tidak terjadi atau tidak bisa diteruskan apabila apa yang menjadi syarat tambahan yang diajukan pihak pemberi hibah tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pihak penerima hibah.

3. Syarat tangguh atau menangguhkan Berdasarkan dalam KUHPerdara yang berlaku dalam pemerintahan menyarakan bahwa persyaratan tambahan yang diajukan dalam suatu akad atau perjanjian (perikatan) masuk kedalam pelaksanaan perikatan dengan syarat tangguh yang merupakan “peristiwa” yang dimaksudkan itu terjadi maka perikatan dilaksanakan<sup>54</sup>. Berdasarkan pasal 1263 merupakan suatu perikatan yang bergantung oleh suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, atau yang bergantung akan hal yang sudah terjadi, dalam yang pertama perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwa terjadi dan yang kedua perikatann mulai berlaku sejak hari ia dilahirkan. Suatu akad dengan adanya syarat tangguh yang digantungkan pada peristiwa yang masih belum tentu akan terjadi perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwanya telah terjadi. Pada akad atau perjanjian syarat tangguh berarti bahwa barang yang menjadi pokok perikatan tetap dunia.<sup>46</sup> Jenis hibah diatas menurut beberapa Ulama seperti Imam Bukhori, Muslim dan teori Imam Ahmad

---

<sup>54</sup> Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bamdung : Pt. Citra Aditya Bakti, 2000), h.209.

menyatakan bahwa “peganganglah ditanganmu harta-hartamu, janganlah mensyaratkan suatu pemberian dengan umurmu, sebab yang memberi dengan mensyaratkan umur harta tersebut adalah bagi yang diberi” maka dapat disimpulkan bahwa hibah yang dilakukan ini hibah yang objek hibahnya sah namun adanya syarat waktu tersebut yang mengakibatkan syarat yang fasid serta menjadikan hibah yang batal atau tidak sah. Karena pada dasarnya pemberian hibah adalah pemberian yang sebenar-benarnya secara langsung dan sempurna kepada orang yang menerima hibah oleh sebab itu apabila dalam suatu hibah mensyaratkan baik pembatasan suatu menjadi tanggung debitur, yang masih tetap menyerahkan barang tersebut apabila syarat dipenuhi. Adapun jika kreditur meninggal dunia sebelum terpenuhinya maka hak-haknya beralihnya kepada ahli warisnya. Syarat tangguh menagguhkan tidak saja akibat hukumnya tetapi sebetulnya adalah alas hak mengalihkan yang ditangguhkan, pada dasarnya perbuatan hukumnya tidak bersyarat walaupun perikatanya bersyaratnya dalam artian bahwa akibat hukum dari sebuah prikatan peralihan haknya ditangguhkan. Contohnya : “Apabila pihak A menghibahkan sebuah mobil kepada pihak B apabila B lulus S1. Apabila B lulus ternyata A telah menyerahkan mobil ( bergerak berwujud) kepada B sedangkan syarat apabila B lulus S1 belum dipenuhi. B adalah pemegang kedudukan berkuasa dan akan menjadi pemilik mobil tersebut dengan dipenuhinya syarat tangguh ( lulus S1) maka B menjadi pemilik adas mobil sedangkan

A (ex pemilik) telah selesai di dalam melaksanakan presentasi dan tidak diperlukan adanya penyerahan khusus atas mobil yang dijadikan antara pihak A-B”. Syarat tidak atau belum dipenuhi, maka pihak yang menyerahkan tetapi berwenang atas bendanya tetapi dengan dibebani kewajiban penyerahan yang ditangguhkan, dipihak-pihak yang memperoleh bendanya menjadi berwenang tetapi semata-mata dengan posisi hak kepemilikan atas bendanya yang ditangguhkan

**e. Pemberian Hibah Bersyarat Menurut Hukum Islam**

Harta benda yang dimiliki oleh seseorang pada hakikatnya adalah milik Allah Swt, yang diamanatkan kepada si pemilik, agar digunakan dan dibelanjakan di jalan yang Allah ridhoi sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid (57 : 7)

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ ۚ فَاَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌۙ

Artinya 7. berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya[1456]. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.<sup>55</sup>

<sup>55</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Tajwid & Terjemah*, Cet 10. (Bandung; CV, Penerbit Deponegoro, 2018), h.538

Pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang maupun badan sosial, keagamaan atau untuk kepentingan ilmiah. Juga kepada seseorang yang sekiranya berhak.<sup>56</sup> Islam mengajurkan umatnya untuk saling memberi lebih baik dari pada menerima. Pemberi harus ikhlas dan tidak ada pamrih apapun, kecuali untuk mendapatkan keridhaan Allah Swt dan untuk mempererat tali persaudaraan. Hibah seperti halnya wasiat tidak boleh berlebih-lebihan, hingga dapat membahayakan dan merugikan pihak yang berhibah maupun pihak penerima hibah dan kepada anggota keluarganya sendiri. Seperti dalam apa yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ( 1 : 177).

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ  
ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ  
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ  
فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya 177. bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan

<sup>56</sup> Hazairi, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta : Timtamas, 1969)., h. 48.



memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.<sup>57</sup>

Dalam penguasaan dan pelestarian harta pemberian hibah sangat penting apabila dilakukan sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam Islam, dimana pihak penerima hibah memiliki hak mutlak dalam pemanfaatan keseluruhan harta hibah yang diberikan. Dalam pemberian hibah maupun dalam penggunaan dan mengambil pemanfaatan harta atau barang hibah hendaknya barang yang saling berkaitan dalam pemberian kepemilikan barang hibah dan kemanfaatannya, barang yang dihibahkan tidak terkait dan tidak dipergunakan bersama harta lain. Hukum hibah tidak bisa ditetapkan kecuali dengan pengambilan barang secara sempurna agar harta tersebut bisa dipergunakan. Karena hibah adalah bentuk pemberian hak milik ketika mereka masih hidup maka tidak boleh menggantungkannya dengan tambahan syarat tertentu.

---

<sup>57</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Tajwid & Terjemah*, Cet 10. (Bandung; CV, Penerbit Deponegoro, 2018), h.27

Dijelaskan dalam uraian sebelumnya bahwa hibah bersyarat merupakan pemberian hibah yang menetapkan penambahan syarat-syarat tertentu seperti pembatasan penguasaan dan penggunaan barang serta adanya syarat batasan jangkauan waktu, dalam hal ini dalam Islam dijelaskan adanya hibah disertai persyaratan yang telah banyak dilakukan oleh bangsa arab yaitu pemberian hibah disertai syarat waktu (hibah Umra), hibah disertai dengan syarat penguasaan (hibah ruqba) dan ijab hibah disertai dengan syarat kemanfaatan.

Hibah disertai dengan syarat tambahan tertentu yang telah diuraikan pada halaman sebelumnya menyatakan bahwa jika syarat tersebut ada maka barang dihibahkan menjadi hak milik sepenuhnya oleh pihak penerima hibah akan tetapi jika syarat tersebut tidak ada maka barang yang dihibahkan tersebut tetap menjadi hak milik yang menghibahkan. Atau tidak berlanjutnya pelaksanaan hibah tersebut syarat tertentu yang dijelaskan dalam hal ini yaitu syarat apa saja yang ditentukan oleh pihak pemberi hibah juga akad hibah dengan tambahan syarat tertentu dengan menggantungkan dengan sesuatu yang belum akan terjadi apabila hal yang digantungkan tersebut belum terlaksana maka hibah tersebut digantungkan dengan syarat tersebut sampai syarat tersebut terlaksana.

Dalam sebuah akad yang dibuat atas dasar suatu perjanjian terdapat kewajiban akad yang timbul yaitu kewajiban yang melekat pada setiap akad dan kewajiban yang diisyaratkan oleh pihak akad. Maka kewajiban yang melekat pada setiap akad merupakan kewajiban yang timbul karena adanya

akad dan tanpa membutuhkan syarat dan kesepakatan pihak akad tetapi melekat pada setiap akad, kewajiban ini bertujuan agar terjadi keseimbangan antara hak pelaku akad dan kewajibannya. Contohnya “kewajiban yang timbul dalam akad jual beli maka pihak penjual wajib menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dan pembeli wajib melakukan penyerahan pembayaran kepada pihak penjual”<sup>58</sup>. Kewajiban yang disyaratkan oleh pihak akad adalah kewajiban ini muncul dan wajib dilaksanakan oleh pihak akad jika disyaratkan dalam akad. Contohnya “persyaratan dalam akad jual beli barang disyaratkan boleh dimanfaatkan oleh pihak barang sebelum diserahkan kepada pihak pembeli”.<sup>59</sup> Dalam pelaksanaan sebuah perjanjian adanya kewajiban yang timbul yaitu timbul karena adanya akad yang harus ada ketika terjadi akad dan kewajiban karena adanya syarat dari pihak akad. Pelaksanaan dalam lingkungan secara umum akad bersyarat biasanya mengandung beberapa hal :

1. (Mu“allaq) yaitu syarat yang menentukan ada tidaknya akad, akad tersebut terjadi karena adanya syarat dan sebaliknya akad tersebut akan tidak ada dengan tidak adanya syarat. Contohnya “seorang penjual mengatakan saya akan menjual bagian saya kepadamu jika sahabat saya setuju.”

---

<sup>58</sup> Oni Sahroni Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah.*, (Jakarta : Rajawali Press, 2016), h.132.

<sup>59</sup> *Ibid.*,

2. Syarat tambahan (Mudhaf) syarat tambahan yang bertujuan untuk menunda konsekuensi hukum akad hingga waktu tertentu, contohnya “saya sewakan rumah tahun ini dimulai dari bulan depan”.<sup>60</sup>
3. Syarat Muqayyid adalah hal-hal yang disyaratkan oleh pihak akad untuk menjadi bagian dari konsekuensi hukum akad. Syarat-syarat tidak bisa dilakukan jika tidak disepakati kedua belah pihak atau ada pihak yang dirugikan karena bukan bagian dari tujuan akad. Contoh “penjual mensyaratkan agar dia dapat memanfaatkan barang jual dalam jangka waktu tertentu”.<sup>61</sup>

Apabila syarat-syarat tersebut bertentangan dengan tujuan akad maka tidak sah, seperti Contohnya dia mengatakan saya hibahkan kepadamu dengan syarat jangan kamu hibahkan dan jangan kamu jual atau dengan syarat harus kamu hibahkan atau kamu jual atau dengan syarat kamu hibahkan kepada fulan sesuatu barang.<sup>62</sup> Maka syarat tersebut tidak sah. Pada dasarnya hibah adalah pemberian milik yang sebenar-benarnya secara langsung dan sempurna kepada orang yang menerima hibah. Seperti yang telah dijelaskan dalam hadis sebagai berikut :

Bila dalam suatu hibah ditetapkan syarat-syarat tertentu, seperti pembatasan penggunaan barang hibah dan sebagainya, maka syarat-syarat yang demikian adalah syarat yang tidak sah. Sekalipun hibahnya sendiri sah,

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, h.134

<sup>61</sup> *Ibid.*, h.135

<sup>62</sup> Muhamad Azam Abdul Aziz, *Fiqih Muamalah*, ( Jakarta : Amzad, 2010), h.477

syarat yang demikian mengakibatkan hibah itu adalah hibah yang fasid (rusak). Karena itu kesahan hibah itu ditangguhkan sampai ada kejernihan syarat-syarat tersebut<sup>63</sup>. Yang dimaksud tidak sah dalam hibah semacam ini adalah hibah yang fasid (rusak), barang yang dihibahkan sebenarnya ada ketika akad berlangsung dan merupakan hak milik orang yang menghibahkan. Akad hibah tersebut menjadi fasid karena tidak terpenuhinya unsur-unsur pelengkapya seperti apabila didalam akad hibah tersebut terdapat sifat-sifat terlarang yang bertentangan dengan karakter dasar akad dan konsukensi hukumnya atau akan terjadinya gharar bagi salah satu pihak akad hibah tersebut. Dan merupakan akad yang tidak memenuhi rukun, syarat dan sifatnya. Akad fasid dapat terjadi karena karena tidak terpenuhinya unsur dasar maupuunsur pelengkap yang dijelaskan diatas. Akad fasid memiliki beberapa karakter antara lain :

- 1) Sebuah akad fasid disebut akad mun'aqid jika terdapat sifat-sifat terlarang yang bertentangan dengan karakter dasar akad dan konsukensi hukumnya atau akan terjadinya gharar bagi salah satu pihak akad hibah.
- 2) Akad fasid itu bisa menjadi tidak legal, jika terdapat sifat-sifat terlarang dalam akad tersebut, sifat terlarang yang dijelaskan tersebut karena sifat tersebut bertentangan dengan karakter dasar akad dan konsukensi hukumnya contohnya “menjual suatu barang dengan syarat penjual mengmbalikan harga setelah masa tertentu, atau dapat pula akan

---

<sup>63</sup> Asymuni A. Rahman, *Tolchah Mansoer, Ilmu Fiqih*, (Jakarta : 1986), h.204.

mengakibatkan akad yang gharar bagi salah satu pihak akad seperti kejelasan terhadap barang objek jual beli yang belum diketahui.

- 3) Syariat Islam tidak mengakui adanya akad fasid.
- 4) Dalam akad fasid tersebut hak-hak yang telah di sepakati kedua belah pihak menjadi tidak berlaku dan yang berlaku adalah kaidah imbang (ta"adul) dalam timbal balik (tabadul).<sup>64</sup>

Akad fasid tidak bisa berubah menjadi akad yang sah walaupun seluruh pihak akad setuju dan ridha. Contoh "kasus ialah A menghibahkan sebuah rumah miliknya kepada si B, dengan syarat : jika B hendak menjual rumah itu pada suatu saat kemudian hari, harus mendapat persetujuan lebih terlebih dahulu dari pihak A atau ahli waris pihak A". Dalam hal ini hibah itu adalah sah karena telah lengkap syarat-syarat dan rukun hibahnya. Tetapi terdapat syarat yang fasid, yaitu kepemilikan terhadap rumah itu belum sempurna, karena ia belum dapat memindahkan haknya terhadap rumah itu dengan sempurna. Dimana ia harus meminta persetujuan terlebih dahulu ke pada A jika hendak menjual rumah itu. Hibah yang seperti ini ditangguhkan kesahaanya sampai A tidak lagi mengemukakan syarat-syaratnya.<sup>65</sup>

Begitu pula dalam praktik pemerian hibah dengan adanya syarat tertentu yaitu adanya pembatasan dalam penguasaan dan pemanfaatan harta hibah yang diberikan oleh pihak pemberi hibah kepada penerima hibah

---

<sup>64</sup> Oni Sahroni Hasanuddin., *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakart : Rajawali Press, 2016), h.103

<sup>65</sup> *Ibid.*, h.204



kemudian disyaratkan penyebaran kemanfaatan yang dapat diambil manfaatnya kepada orang lain atau pihak ketiga. Pada dasarnya dalam bidang penguasaan dan pemanfaatan harta hibah dimana hibah tidak bisa dijadikan hak milik kecuali ada penyerahan.

Disyaratkan dalam hibah agar dia mendapat izin dari pemberi hibah ketika akan mengambil harta hibah tersebut karena si pemberi memiliki hak khiyar sebelum diserahkan apabila ia mau diteruskan dan jika tidak mau dia kembali dan tidak memberikannya, sebelum ia menerima hibah sebelum ada izin dari si pemberi maka hibah tidak sempurna dan penyerahan tidak sah.<sup>66</sup>

Akad hibah tidak akan sempurna hanya dengan adanya ijab dan kabul saja bila belum adanya penguasaan atas barang tersebut, hal ini menunjukkan bahwa hibah tidak bisa dimiliki kecuali dengan proses pengambilan dan penguasaan barang. Dalam hal ini tersebar nya sebagian barang atau kemanfaatan dianggap sebagai penghalang, menurut para ulama dijelaskan bahwa : Menurut Imam Hanifah bahwa tersebar nya barang yang terjadi ketika pengambilan barang akan menghalangi sah nya hibah, akan tetapi jika terjadi apa saat akad saja tidak mengakibatkan batal, sebaliknya kedua sahabatnya tidak beranggapan tersebar nya barang sebagai penghalang keabsahan hibah kecuali terjadi pada saat transaksi terjadi secara langsung dan ketika pengambilan barang, jika penyebaran barang terjadi pada saat transaksi, tidak terjadi ketika barang diambil, ia tidak menghalangi keabsahan hibah.

---

<sup>66</sup>Muhamad Azam Abdul Aziz, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzad, 2010), h.449

Demikian juga saat pengambilan barang dan tidak terjadi saat transaksi. Perbedaan tersebut mengakibatkan perbedaan dalam beberapa hukum cabangnya, antara lain sebagai berikut:

1. Apabila seseorang menghibahkan sesuatu yang tidak bisa dibagi kepada dua orang menurut pendapat Abu Hanifah hibah tersebut tidak sah karena adanya penghalang hibah yang terjadi pada saat pengambilan barang, karena terdapat penyebaran barang ketika pengambilan barang.
2. Namun apabila dua orang menghibahkan barang milik mereka berdua kepada satu orang, menurut semua ulama, hibah tersebut sah sebab tidak terjadi penyebaran barang ketika pengambilan barang dan karena tidak terdapat penyebaran barang dalam dua kondisi, menurut kedua sahabat Abu Hanifah. Penyebaran barang hanya terjadi pada saat transaksi, tidak terjadi pada saat pengambilan barang.<sup>67</sup>

Abu Hanifah berpendapat bahwa hibah seseorang kepada dua orang adalah menyerahkan kepemilikan setengah harta hibah tersebut kepada masing-masing pihak. Seolah-olah ia mengkhususkan hibah setengah harta bagi masing-masing pihak jadi, tersebarnya barang terjadi pada saat akad yang sama. Berdasarkan hal tersebut, contohnya jika seseorang berkata kepada dua orang saya hibahkan setengah rumah saya untuk fulan dan setengahnya lagi untuk si fulan. Atau ia berkata kepada salah satu diantara keduanya, saya

---

<sup>67</sup> Musthafa Dib Al-bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta : PT Mizan Publik, 2009), h.115

hibahkan setengah rumah saya untuk kamu dan setengahnya lagi untuk orang ini. Hibah semacam ini tidak sah sebab penyebaran barang terdapat pada akad yang sama. Disamping itu penyebaran barang juga pada saat pengambilan barang. Hal ini menghalangi keabsahaan hibah.<sup>68</sup> Hal tersebut berbeda dengan keadaan ketika seseorang berkata, “saya hibahkan rumah ini kepada kalian berdua untukmu setengah dan untuk orang lain setengah, menurut keduanya hibah ini sah sebab penyebaran barangnya tidak masuk kedalam transaksi yang sama, penyerahan kepemilikan disini untuk rumah seutuhnya”. Adapun terlontarnya perkataan “untuk orang ini setengah dan untukmu setengah hanya untuk mengungkapkan tafsiran hukum yang sudah tetap oleh akad.”<sup>69</sup>

Ada pula ketika “seseorang mengatakan kepada dua orang bahwa saya menghibahkan rumah saya, yang mana saya hibahkan setengah rumah saya untuk si fulan dan yang setengah lagi untuk si fulan yang lainnya. Atau ia mengatakan kepada salah satu diantara keduanya saya hibahkan setengah rumah saya untuk kamu dan sebagiannya yang lainnya untuk orang ini.” Menurut para ulama<sup>7a</sup>, hibah semacam ini tidak sah, sebab penyebaran barang atau syuyu terdapat pada akad yang sama. Disamping itu pula penyebaran barang juga ada saat pengambilan barang tersebut. Hal ini menghalangi kesahan dalam pemberian hibah. Kemudian salah satu yang menjadi syarat syarat sah dan dibolehkannya barang-barang yang yang boleh dihibahkan

---

<sup>68</sup>*Ibid.*, h.116

<sup>69</sup>*Ibid.*, h.117

adalah barang atau harta yang di hibahkan itu telah terpisah dari harta yang tidak dihibahkan, seperti contohnya “seseorang memiliki sebidang tanah, yang akan di hibahkan adalah seperempat dari seluruh tanah tersebut, makadiwaktu menghibahkan tanah yang seperempat itu telah di pecah atau ditentukan bagian dan tempatnya secara jelas”, apabila adanya pembagian yang dilakukan secara tidak jelas atas pemisahan harta yang dihibakan atau mensyaratkan yang menimbulkan ketidak jelasan dan tercampurnya barang yang dihibahkan dengan barang yang tidak dihibahkan hal ini menimbulkan hibah tersebut tidak diperbolehkan karena tidak terpenuhny syarat sah barang atau harta yang dihibahkan. Contohnya “seseorang menghibahkan bulu domba yang masih menempel di punggung domba, menghibahkan buah yang masih berada diatas pohonya, menghibahkan rumah yang didalam rumah tersebut masih ada barang dari milik pemberi hibah, atau menghibahkan pohon yang masih ada buahnya, tetapi tidak dengan buahnya.”<sup>70</sup>

Akad semacam ini merupakan akad yang tiadak sah. Agar barang hibah tersebut dapat diserahkan dan dimiliki sepenuhnya, maka barang-barang tersebut harus bebas dari barang-barang yang lain yang tidak ikut dihibahkan. Dalam pengambilan dan penguasaan barang secara mutlak akan menjadi sah dalam akad hibah dan akad hibah tersebut akan terlaksana jika syaratsyarat berikut terpenuhi : Ada izin pemberhibah dalam pengambilan barang hibah harus di sertai dengan izin orang yang memberi hibah serta persetujuan bagi

---

<sup>70</sup> *Ibid.*,h.109

kedua belah pihak. Menurut Ulama Mazhab Syafi'i, izin pengambilan barang diisyaratkan harus disampaikan secara jelas atau pemberi hibah memberikan secara langsung barang kepada penerima. Menurut Ulama Hanafiah izin dalam pengambilan barang ada dua macam yaitu izin dengan ungkapan yang jelas dan izin berupa isyarat petunjuk.

- 1) Izin yang jelas seperti seorang berkata terimalah atau aku izinkan engkau untuk mengambilnya.
- 2) Izin pengambilan barang dengan isyarat petunjuk adalah penerima hibah menerima barang langsung di tempat transaksi dan di saksi dengan pemberi hibah. Harta yang dihibahkan tidak disertai barang lain yang tidak dihibahkan.
- 3) Pengambilan barang hibah merupakan orang yang layak. Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan pada halaman sebelumnya suatu proses pemberian yang seharusnya dilakukan oleh orang tua kepada anaknya disunnahkan untuk berperilaku adil, menyamaratakan pemberian kepada anak-anaknya dan menghukumi makruh bila membedakan dengan melalui musyawarah

#### **f. Hikmah Hibah**

Hibah bisa menimbulkan rasa cinta dalam hati dan bisa menghilangkan kedengkian, saling tolong menolong dengan cara mengandung faedah yang besar bagi manusia. mungkin seseorang datang membutuhkan sesuatu tapi

tidak tahu melalui jalan mana dia harus tempuh untuk mencukupi kebutuhannya. Tiba tiba datanglah sesuatu yang di butuhkan itu dan seorang teman atas kerabat sehingga hilanglah kebutuhannya. Pahala orang yang memberi tentu saja besar dan mulia.

Apabila seseorang suka memberi, berarti berusaha mendapatkan sifat paling mulia, karena dalam memberi, orang yang menggunakan kemuliaan, menghilangkan kebakhilan jiwa, memasukan kegembiraan kedalam hati orang yang diberi, mewariskan rasa kasih sayang dan terjalin rasa kasih sayang antara pemberi dan penerima, serta menghilangkan rasa iri hati. Maka orang yang suka memberi termasuk orang yang beruntung.<sup>71</sup> Allah berfirman dalam Al Qur'an Surat Al-Hasyr Ayat 9

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ  
وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

Artinya 9. dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan

<sup>71</sup>Hadi Mulyo Dan Shobahussurur, Terjemah *Filsafah Dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: Asy, 1992), h.395-397



(orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri, Sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang-orang yang beruntung

Hibah Yang berhikmah menurut Hukum Islam harus memenuhi beberapa syarat yaitu

1. menghidupkan semangat kebersamaan dan saling tolong menolong dalam kebaikan
2. menumbuhkan sifat kedermawanan
3. menimbulkan sifat-sifat terpuji seperti saling sayang menyayangi antar sesama manusia.
4. Pemerataan pendapatan menuju terciptanya stabilitas sosial yang mantap
5. Mencapai keadilan dan kemakmuran yang merata.<sup>72</sup>

## **B. Tinjauan Pustaka**

Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan hukum Islam tentang praktik lembaga *leasing* dan koperasi desa dalam pembiayaan acara keagamaan di Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, adapun penelitian ini menyerupai atau hampir mirip dengan permasalahan yang akan penulis ingin teliti di antaranya

1. Skripsi Janis Kurniasih Npm 13112299 mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Metro, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah(Muamalah) Yang

---

<sup>72</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.121

Berjudul “Kedudukan Hibah Sebagai pengganti Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kedaton 1, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)” dari hasil penelitian yang dilakukan penelitian adalah mencakup tentang hibah yang diberikan oleh seorang ayah kepada anak Sebagai pengganti nafkah kepada anak tersebut karena perceraian, dan ibu yang melahirkan anak tersebut berhak meminta Hibah dari ayahnya yang sebagai ganti dari nafkah yang harus dipenuhi kewajiban dari ayah anak tersebut walaupun sudah terjadi perceraian menurut Hukum Islam.<sup>73</sup>

2. Skripsi Mariana, Npm 132111021, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Yang Berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Hibah Yang Di Sengketakan Akibat Tidak Adanya Bukti Akta Hibah (Studi Kasus Di Dusun Patiorang) dari hasil penelitian yang dilakukan penelitian adalah Mencakup Belum Ada Kejelasan Kepastian Dalam Pemberian Hibah tersebut Karena Tidak Memiliki Bukti Tulisan Atau Ucapan Yang Dapat Membenarkan Tanah tersebut Benar Sudah Di Hibahkan Atau Tidak, Berdasarkan Hukum Islam Sudah Dijelaskan Bawah Syarat Untuk Melakukan Hibah tersebut Harus

---

<sup>73</sup> Janis Kurniasih, Kedudukan Hibah Sebagai pengganti Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kedaton 1, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, 2013)

Dilakukannya Ijab Dan Qabul Antara *Wahib* Sebagai Pemberi Hibah Dan *Mauhud Lah* Sebagai Penerima Hibah Tersebut.<sup>74</sup>

3. Feti Martiya, Npm 1521030207, Mahasiswa Universitas Islam Negeri lampung, Jurusan Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) Tahun 2015 yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Tanah Yang Bersyarat” (studi kasus di Desa Sangkaran Bhakti, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan), dari hasil penelitian yang dilakukan penelitian adalah mencakup ketidak jelasan antara hibah yang diberikan pemilik tanah, karena hibah yang di berikan adalah pemanfaatan lahan untuk penanaman, dan tanah hibah itu hanya diberikan selama tanaman yang di atasa tanah masih hidup dan umur tanaman tersebut tidak bisa menjadikan patohan hibah yang itu sah atau tidak, maka dapat disimpulkan bahwa hibah yang diberikan tersebut belum memenuhi syarat dari hibah.<sup>75</sup>

Jika dilihat dari uraian di judul judul skripsi di atas, maka terdapat persamaan dan juga perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti kembali,, persamaannya, yaitu skripsi di atas sama sama membahas tentang akad *Musyarakah*, sedangkan yang membedakan penelitian yang di atas dengan yang akan penulis teliti yaitu penulis akan mengangkat tentang praktik dari pembiayaan lembaga *Leasing* dan koperasi desa dalam acara

---

<sup>74</sup> Mariana, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Hibah Yang Di Sengketakan Akibat Tidak Adanya Bukti Akta Hibah (Studi Kasus Di Dusun Patiorang, Makassar, 2013)

<sup>75</sup> Feti Martiya, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Tanah Yang Bersyarat” (studi kasus di Desa Sangkaran Bhakti, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Lampung, 2015)

kagamaan di Desa Telogo Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten  
Lampung Timur.



## DAFTAR PUSTAKA

### I. Sumber Utama

#### A. Al-Qura'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Tajwid & Terjemah*, Cet 10. (Bandung; CV, Penerbit Deponegoro, 2018),

#### B. Al-Hadist

Abi Thayyib Muhammad Syamsi Al-Chaq al- Adhim Abadi dan Syamsudin Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, '*Aunul Ma'buud, Syara Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiah, 1990),  
Al-Hafind Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Terjemahan Bulugul Maram Min Adila Ahkam*, (Jakarta: Putra Amani, 1996),.

### II. Sumber Pokok

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010).

Abdul Hadi, Abu Sura'I. *Bunga Bank Dalam Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas. 1993)

Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori Dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)

Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, Riba, *Garar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persda, 2015).

Al-Hafind Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Terjemahan Bulugul Maram Min Adila Ahkam*, (Jakarta: Putra Amani, 1996),

Agus Rijal, *Hutang Halal Hutang Haram*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2013).

Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid I* (Jakarta: Kencana, 2009)

Af Ath-Thayar, A. B, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009)

Asymuni A. Rahman, *Tolchah Mansoer, Ilmu Fiqih*, (Jakarta : 1986

Abdulah Bin Abdulrahman Ali Bassam, *Syariah Hadist Pilihan Bukhari – Muslim*,(Jakarta :Darul Falah, 2004),

Andi, Yazid, *Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Logung Pustaka,2009)

Chuzaimah T Yanggo, Hafis Anshari, *Problematika Hukum Islam Konteporer*,(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004),

Darsono, Et Al., *Perbankan Syariah Di Indonesia Kelembagaan Dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017).

Dewi S.Baharta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Bintang Terang, 1995 )

Ditjen Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2013)

Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),

Heru Puji Winarso, *Sosiologi Komunikasi Masa*. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005)



Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2003),

Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, Cet ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

Idris, *Hadis Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia, 2015).

Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)

Imam Ghazali Said, *Bidayatul Al-Mujtahid*, jilid-4, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995),

Kartono, K. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. (Bandung: Mandar Maju 1996)

Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002)

Handi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Press, 2014)

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Pranade Media, 2012)

Mohammad Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1999).

Muhamammad ,*Dasar Dasar Keuangan Islam*,(Yogyakarta: Ekonesia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004),

M. Umer Capra, *Al-Quran Menuju Sistem Ekonomi Moneter Yang Adil*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997),

Moh Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Jakarta: Risalah Gusti, 1996),

Moelong, L. J. (N.D.). *Metode Penelitian Kualitatif.*, (Bandung: Ramaja Rosda Karya 2005)

Muhamad Azam Abdul Aziz, *Fiqih Muamalah*, ( Jakarta : Amzad, 2010),

Muhammad, *Managemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2005)

Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014)

Nejatullah Siddiq, *Kemitraan Usaha Dan Hasik Dalam Islam*, (Jakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996)

Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000),

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015).

Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, Alih Bahaa Abdul Hayyie Al-Kattani, Ahmad Ikhwani Dan Budiman Mushtofa, Cet-1, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2005),

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007),

Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)

Sulaiman Rasjid , *Fiqih Islam*, Cet-26, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996)

Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012).

Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah Produk Produk Dan Aspek Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014)

Syarifudin Amir, *Ushul Fiqih*, (Jilid 1, Cet.1) Jakarta: Logos, Wacana Ilmu,

Suhendi, H, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2014)

Susanto, A, *Pengenalan Komputer*. (Jakarta: Komunitas Ilmu Komputer. 2009)

Oni Sahroni Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syaria.*, (Jakart : Rajawali Press, 2016),

Veithzal Rivai, *Financial Institution Management*, (Jakarta: graha Grafindo Persada , 2013)

Wardi . *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Amzah, 2010)

Yarifudin, A, *Ushul Fiqh Jilid I*. Jakarta: Kencana, 2009)

### III. Jurnal

Muhammad Tho'in, *Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks* (Studi Atas Hadits Riwayat Tentang Pelaknatan Riba), Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 2, (Juli, 2016).

Uswah Hasanah, Riba Dan Bunga Bank Dalam Persepektif Fiqih, Vol.III.No.1, (Januari-Juni 2014)

Khoiruddin Buzama, , "Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam di Indonesia." Jurnal Al-'Adalah, Vol. 10, No.2, Juli 2012 (Bandar Lampung Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2012).h. 468.(Online), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/artic le/view/300>. ( 15 mei 2019).

#### IV. Sumber Penunjang

Documen Monografi Desa Telogo Rejo Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Tahun 2020

Miswanto Darmayanto kepala desa telogorejo, Wawancara Dengan penulis Di Desa Telogorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, 10 November 2020

Dieka Arie Kumbara Ketua Karang Taruna Desa Telogorejo, Wawancara Dengan penulis di Desa Telogorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, 11 November 2020

Eko wahyudi Pamong kesejahteraan rakyat , Wawancara Dengan Penulis di Desa Telogorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, 10 November2020

Deni Antesar Wakil ketua Karang Taruna Desa Telogorejo , Wawancara Dengan penulis, di Desa telogorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. 10 November 2020

Mafrhim Sekretaris Desa Telogorejo, Wawancara Dengan penulis di Desa Telogorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, 10 November 2020

Abrori ketua Remaja Islam Masjid, Wawancara Dengan penulis di Desa Telogorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, 11 November 2020

Suparman pemilik koperasi desa, Wawancara Dengan penulis di Desa Telogorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, 10 November 2020

Dimas aji saputra pegawai lembaga *leasing*, Wawancara Dengan penulis di Desa Telogorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, 11 November 2020

Sigit panitia pelaksana, Wawancara Dengan penulis di Desa Telogorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, 11 November 2020

Bayani panitia pelaksana, Wawancara Dengan penulis di Desa Telogorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, 10 November 2020

Agung panitia pelaksana, Wawancara Dengan penulis di Desa Telogorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, 10 November 2020

Irfan panitia pelaksana, Wawancara Dengan penulis di Desa Telogorejo,  
Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, 11  
November 2020

Septia panitia pelaksana, Wawancara Dengan penulis di Desa Telogorejo,  
Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, 10  
November 2020

Indah panitia pelaksana, Wawancara Dengan penulis di Desa Telogorejo,  
Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, 11  
November 2020

Tia panitia pelaksana, Wawancara Dengan penulis di Desa Telogorejo,  
Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, 11  
November 2020

Jeki mei panitia pelaksana, Wawancara Dengan penulis di Desa Telogorejo,  
Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, 10  
November 2020

Silvia panitia pelaksana, Wawancara Dengan penulis di Desa Telogorejo,  
Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, 11  
November 2020

Sudarman panitia pelaksana, Wawancara Dengan penulis di Desa  
Telogorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi  
Lampung, 11 November 2020